



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan karuniaNya kita dikaruniai kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2018.

Setiap tahunnya, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen kontrak kinerja Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dengan Wali Kota Balikpapan dan selanjutnya pertanggungjawabannya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP sendiri berpedoman pada Peraturan Men PAN-RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LKjIP Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 selain menjadi sarana pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana evaluasi dan perbaikan atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada penyusunan LKjIP tahun berikutnya.

Balikpapan, Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



SAYID MN FADLI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri PAN-RB No. 53 Tahun 2014 merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian indikator kinerja, penjelasan yang memadai tentang pencapaian kinerja, dan perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Visi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2017-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA SETDAKOT SEBAGAI FASILITATOR DAN ADVISOR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN”

Sesuai dengan Visi tersebut maka Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menetapkan 3 (Tiga) Misi yaitu :

1. Mengoptimalkan koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik
2. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Aparatur yang Bersih dan Baik (Good and Clean Government)
3. Meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintahan melalui pembinaan aparatur yang terprogram dan sinergis

LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perjanjian Kinerja yang memuat perencanaan, pencapaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis, Indikator kinerja yang digunakan harus mampu mengukur pencapaian sasaran strategis, dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Renstra

Tahun 2018 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2017 – 2021. Matrik Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam mewujudkan Visi telah ditetapkan 3 Misi, 4 Tujuan, 11 Sasaran Strategis dan 15 Indikator Sasaran, maka capaian indikator sasaran dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dari Sekretaris Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Dari penilaian indikator maka dapat dinilai bahwa pencapaian sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" dengan rata-rata capaian sebesar 105,33% atau kategori Sangat Tinggi
2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama" dengan rata-rata capaian sebesar 95 % atau Sangat Tinggi
3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum" dengan rata-rata capaian sebesar 89,89% atau Kategori Tinggi
4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan" dengan rata-rata capaian sebesar 103,12% atau Sangat Tinggi
5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat" dengan rata-rata capaian sebesar 84,33% atau Kategori Tinggi
6. Capaian Indikator Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan" dengan capaian sebesar 87,58% atau Tinggi.
7. Capaian Indikator Sasaran Strategis "Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan" dengan capaian sebesar 93,75% atau Sangat Tinggi.
8. Capaian Indikator Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa" dengan capaian sebesar 112.67% atau Sangat Tinggi.
9. Capaian Indikator Sasaran Strategis "Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah" dengan capaian sebesar 103,17% atau Sangat Tinggi.
10. Capaian Indikator Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" dengan capaian sebesar 106,46 atau Sangat Tinggi.
11. capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah" dengan capaian 98% atau Sangat Tinggi

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 dengan nilai rata-rata 98,12% atau dapat dikategorikan Sangat Tinggi.

Balikpapan, Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



SAYID MN FADLI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	1
D. Sumber Daya Aparatur	4
E. Aspek Strategis Organisasi	4
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	4
G. Sarana dan Prasana Kerja	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	6
B. Indikator Kinerja Utama	22
C. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	31
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	32
C. Analisis Capaian Kinerja	34
D. Realisasi Anggaran	81
BAB IV PENUTUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel	Isi Tabel	Hal
1.1	Daftar Aparatur PNS dan Non PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017	4
1.2	Sarana Prasarana Kerja Sekretariat Daerah	5
2.1	Perencanaan Strategis Setda Kota Balikpapan Tahun 2016-2021	8
2.2	Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran	11
2.3	Indikator Kinerja Utama 2017-2021	22
2.4	Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018	24
2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	26
2.6	Target Belanja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018	29
2.7	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	29
3.1	Rincian Penilaian Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2017	31
3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2018	31
3.3	Analisis Pencapaian Sasaran 1 dan perbandingan dengan Target Akhis Renstra Tahun 2018	35
3.4	Analisis Pencapaian Sasaran 1 dan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	35
3.5	Analisis Pencapaian Sasaran 1 dan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	36
3.6	Analisis Pencapaian Sasaran 1 dan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	36
3.7	Analisis Pencapaian Sasaran 1 atas efisiensi penggunaan sumber daya	37
3.8	Analisis Pencapaian Sasaran 2 dan perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018	38
3.9	Analisis Pencapaian Sasaran 2 dan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	39
3.10	Analisis Pencapaian Sasaran 2 dan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	39
3.11	Analisis Pencapaian Sasaran 2 dan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	40
3.12	Analisis Pencapaian Sasaran 2 atas efisiensi penggunaan sumber daya	41
3.13	Analisis Pencapaian Sasaran 3 dan perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2017	42
3.14	Analisis Pencapaian Sasaran 3 dan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	43
3.15	Analisis Pencapaian Sasaran 3 dan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	43
3.16	Analisis Pencapaian Sasaran 3 dan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	44
3.17	Analisis Pencapaian Sasaran 3 atas efisiensi penggunaan sumber daya	46
3.18	Analisis Pencapaian Sasaran 4 dan perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2017	47
3.19	Analisis Pencapaian Sasaran 4 dan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	48
3.20	Analisis Pencapaian Sasaran 4 dan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	48

3.21	Analisis Pencapaian Sasaran 4 dan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	49
3.22	Analisis Pencapaian Sasaran 4 atas efisiensi penggunaan sumber daya	51
3.23	Analisis Pencapaian Sasaran 5 dan perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2017	51
3.24	Analisis Pencapaian Sasaran 5 dan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	52
3.25	Analisis Pencapaian Sasaran 5 dan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	52
3.26	Analisis Pencapaian Sasaran 5 dan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	53
3.27	Analisis Pencapaian Sasaran 5 atas efisiensi penggunaan sumber daya	55
3.28	Analisis Pencapaian Sasaran 6 dan perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2017	55
3.29	Analisis Pencapaian Sasaran 6 dan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	56
3.30	Analisis Pencapaian Sasaran 6 dan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	56
3.31	Analisis Pencapaian Sasaran 6 dan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	57
3.32	Analisis Pencapaian Sasaran 6 atas efisiensi penggunaan sumber daya	58
3.33	Analisis Pencapaian Sasaran 7 dan perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2017	59
3.34	Analisis Pencapaian Sasaran 7 dan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	59
3.35	Analisis Pencapaian Sasaran 7 dan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	59
3.36	Analisis Pencapaian Sasaran 7 dan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	61
3.37	Analisis Pencapaian Sasaran 7 atas efisiensi penggunaan sumber daya	62
3.38	Analisis Pencapaian Sasaran 8 dan perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2017	62
3.39	Analisis Pencapaian Sasaran 8 dan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	63
3.40	Analisis Pencapaian Sasaran 8 dan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	64
3.41	Analisis Pencapaian Sasaran 8 dan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	64
3.42	Analisis Pencapaian Sasaran 8 atas efisiensi penggunaan sumber daya	65
3.43	Analisis Pencapaian Sasaran 9 dan perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2017	66
3.44	Analisis Pencapaian Sasaran 9 dan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	67
3.45	Analisis Pencapaian Sasaran 9 dan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	67
3.46	Analisis Pencapaian Sasaran 9 dan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	68
3.47	Analisis Pencapaian Sasaran 9 atas efisiensi penggunaan sumber daya	70
3.48	Analisis Pencapaian Sasaran 10 dan perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2017	70
3.49	Analisis Pencapaian Sasaran 10 dan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	71

3.50	Analisis Pencapaian Sasaran 10 dan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	72
3.51	Analisis Pencapaian Sasaran 10 dan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	72
3.52	Analisis Pencapaian Sasaran 10 atas efisiensi penggunaan sumber daya	74
3.53	Analisis Pencapaian Sasaran 11 dan perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2017	75
3.54	Analisis Pencapaian Sasaran 11 dan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	76
3.55	Analisis Pencapaian Sasaran 11 dan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	77
3.56	Analisis Pencapaian Sasaran 11 dan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	77
3.57	Analisis Pencapaian Sasaran 11 atas efisiensi penggunaan sumber daya	81
3.58	Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja	82
3.59	Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan di bentuk berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan;
- b. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan dan Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga lainnya serta pelayanan administratif, Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga Perangkat Daerah lainnya;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pengendalian layanan pengadaan barang dan jasa;
- e. pelayanan administratif perangkat daerah dan lembaga perangkat daerah lainnya;
- f. pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan yang berlaku.

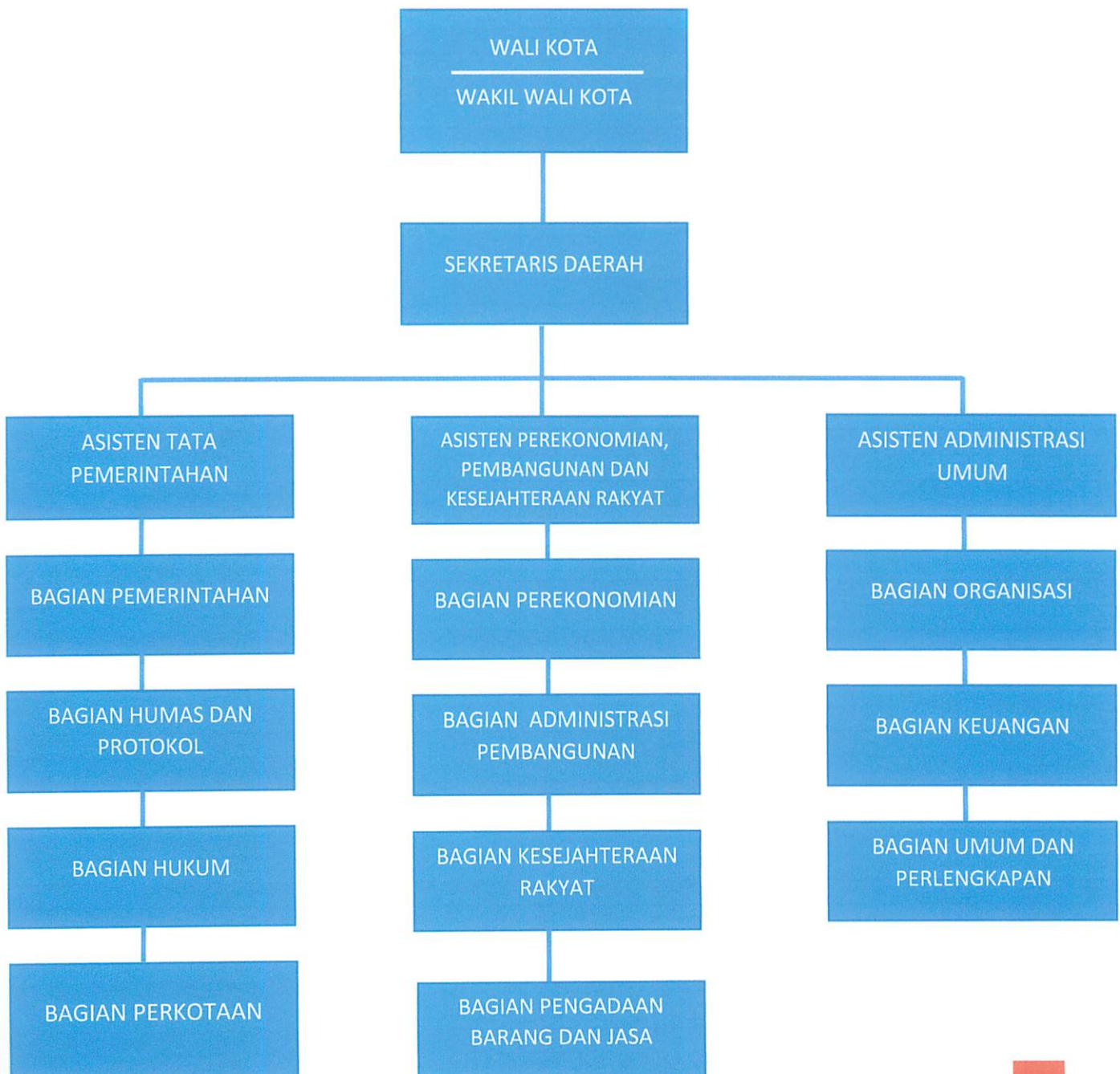
C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan ditunjang dengan uraian struktur organisasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Tata Pemerintahan membawahkan;
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pengembangan Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Bina Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
 - c) Sub Bagian Ketenteraman, Ketertiban dan Kemasyarakatan;
 2. Bagian Perkotaan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Kerjasama Daerah;
 - b) Sub Bagian Administrasi Wilayah;
 - c) Sub Bagian Manajemen Perkotaan ;
 3. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - b) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 4. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Kehumasan ;
 - b) Sub Bagian Analisa Informasi Komunikasi;
 - c) Sub Bagian Protokol;
- c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan;
 1. Bagian Perekonomian, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Produksi Daerah;
 - b) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Program Kerja;
 - b) Sub Bagian Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Pelaporan;
 3. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Administrasi dan Perencanaan
 - b) Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan ;
 - c) Sub Bagian Layanan Pengadaan;
 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Sub Bagian Kepemudaan, Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Sosial dan Kesehatan;
- d. Asisten Administrasi Umum membawahkan ;

1. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tatalaksana dan Pembinaan Pelayanan Publik;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja;
 2. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Analisa Keuangan dan Perencanaan Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Keuangan;
 3. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
- e. kelompok jabatan fungsional.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :



D. SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan data Simpeg Tahun 2017 sebanyak 247 orang

Tabel1.1

Daftar Aparatur PNS dan NON PNS

Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
SEKRETARIS DAERAH	1		1				1					
ASISTEN	1		1				1					
STAF AHLI	2	1	3				1	2				
KABAG	9	2	11				2	9				
KASUBAG	17	16	2	31			5	20	6	2		
PELAKSANA	73	33		31	73	2		16	18	63	4	5
JFT	4	7		11				11				
Jlh PNS	108	59	20	72	73	2	10	60	23	65	4	5
Jlh NABAN/THL	55	33						27	9	44	7	1
Jlh PNS + NABAN/THL	163	92	20	72	73	2	10	87	32	109	11	6
Jumlah	255											

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek-aspek strategis yang diemban Sekreatriat Daerah Kota Balikpapan meliputi :

1. Adanya keselarasan kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan otonomi daerah;
2. Optimalisasi koordinasi di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
3. Berfungsinya mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif dan efisien menuju tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Adanya sistem pelayanan yang mudah, aman, cepat, efisien, ekonomis, adil, transparan dan tepat sasaran;
5. Tersedianya aparatur yang professional untuk mendorong meningkatkan kinerja, transparan dan persaingan yang sehat.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain adalah manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah

efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan secara singkat Sarana dan Prasarana Kerja perangkat daerah per 31 Desember 2018

TABEL 1.2
SARANA PRASARANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	114	M2
2	Alat-Alat Besar	6	Unit
3	Alat-Alat Angkutan	159	Unit
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	27	Unit
5	Alat Pertanian	5	Unit
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	3376	Unit
7	Alat Studio Dan Alat Komunikasi	374	Unit
8	Alat-Alat Kedokteran	4	Unit
9	Alat Laboratorium	231	Unit
10	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	2	Unit
11	Bangunan Gedung	10	Bangunan
12	Monumen	6	Bangunan
13	Bangunan Gedung Lainnya	2	Bangunan
14	Instalasi	7	Instalasi
15	Jaringan	58	Jaringan
16	Buku dan Perpustakaan	2	Buah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Tahun 2017-2021

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Nomor 188.3/196/ORG tanggal 28 Februari 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017-2021. Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tersebutkan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Pada Renja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Visi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA SETDAKOT SEBAGAI FASILITATOR DAN ADVISOR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN”

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kota Balikpapan merumuskan misi yang dapat menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1.2.1. Mengoptimalkan koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik

1.2.2. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Aparatur yang Bersih dan Baik (Good and Clean Government)

1.2.3. Meningkatnya pelayanan administrasi Pemerintahan melalui pembinaan aparatur yang terprogram dan sinergis

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) Tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebanyak 6 (enam) sasaran strategis.

Tabel 2.1.

PERENCANAAN STRATEGIS SETDA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KONDISI AWAL 2016	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
							2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Nilai LPPD	3,0 (Sangat Tinggi)	3,0 (Sangat Tinggi)	3,0 (Sangat Tinggi)	3,0 (Sangat Tinggi)	3,0 (Sangat Tinggi)	3,0 (Sangat Tinggi)
		2	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama	2	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum	3	Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				4	Hasil capaian penilaian implementasi HAM	85,88	90	91	92	93	94

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		KONDISI AWAL 2016	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
							2017	2018	2019	2020	2021
2	Meningkatkan fungsi koordinasi, fasilitasi dan pengendalian pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan Sosial	4	Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota	5	Nilai Kontribusi BUMD Terhadap PAD/Investasi	Rp. 9.153.284.184	Rp. 10 M	Rp. 10 M	Rp. 10 M	Rp. 10 M	Rp. 10 M
				6	Persentase inflasi Kota Balikpapan	4,13	5 ± 1%	5 ± 1%	5 ± 1%	5 ± 1%	5 ± 1%
		5	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat	7	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	5,15%	5,50%	6%	6,50%	7%	7,50%
		6	Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan	8	Persentase capaian program/kegiatan strategis		80%	80%	80%	80%	80%
		7	Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan	9	Persentase perizinan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan		80%	80%	80%	80%	80%

		8	Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	10	Indeks kepuasan pengadaan barang dan jasa Pemerintah		3.0	3.0	3.5	3.5	4.0
3	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	11	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKJIP pada sub komponen pelaporan kinerja pada bobot nilai lebih dari sama dengan 10%		65%	70%	75%	80%	85%
		10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	12	Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan	71,99	73	74	75	78	80
4	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	11	Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah	13	Persentase realisasi/capaian anggaran Sekretariat Daerah sesuai perencanaan	88,33%	87%	88%	89%	90%	91%
				14	Indeks Kepuasan pelayanan Sarana dan Prasarana		75	77	79	81	83
		15	Indeks Kepuasan layanan kehumasan dan Keprotokolan		80	81	82	83	84		

Tabel. 2.2.
Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

NO	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Target		Program		Kegiatan
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai LPPD	3.0	1	Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan	1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Balikpapan
		2	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi dalam Penyelenggaraan Kerjasama	2	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	2	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	2	Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
		3	Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum	3	Presentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	3	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	3	Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah
									4	Sosialisasi produk hukum dan pembinaan keluarga sadar hukum
									5	Kodifikasi dan penataan dokumentasi hukum
									6	Pengarsipan Hukum Online
		4	Hasil capaian penilaian implementasi HAM	4	91	4	Program Bantuan Hukum dan HAM	7	Proses Penyelesaian Perkara dan Pemberian Bantuan Hukum	
								8	Rapat koordinasi Panitia RANHAM Kota Balikpapan	

NO	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Target		Program		Kegiatan		
2	Meningkatkan fungsi koordinasi, fasilitasi dan pengendalian pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan Sosial	4	Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota	5	Nilai Kontribusi BUMD Terhadap PAD/Investasi	Rp. 10 M	5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9	Pembinaan dan Pengembangan Potensi BUMD Kota Balikpapan		
							6	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana	10	Fasilitasi Koordinasi dan Pengawasan Pengembangan Sarana Prasarana Perekonomian Daerah		
							7	Program Pengendalian Inflasi	11	Pengendalian Inflasi Daerah		
									12	Koordinasi pengawasan dan evaluasi pendistribusian pupuk bersubsidi		
		5	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat	7	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	6%	9	Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	8	Program Pengembangan City Gas	13	Survei Pengembangan Jaringan Gas Rumah Tangga
									14	Pelaksanaan BBGRM dan Penilaian Kelurahan Terbaik tingkat Kota Balikpapan	15	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Mahasiswa KKN
											16	Pembinaan Posyandu
											17	Peningkatan Kesegaran Jasmani
									10	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	17	Peningkatan Kesegaran Jasmani

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	
11					Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	16	Penguatan peran PKK melalui fungsi Kesekretariatan TP PKK Kota
						17	Penguatan peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja I
						18	Penguatan peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja II
						19	Penguatan peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja III
						20	Penguatan peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja IV
						21	Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita Persatuan
						12	
23	Pengadaan Natura Pondok Pesantren						
13					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	24	Tabligh Akbar dalam rangka HUT Kota Balikpapan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan
						25 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Propinsi dan Nasional
						26 Pelaksanaan Hari Besar Agama Islam
						27 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
					14 Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	28 Koordinasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Perlindungan Masyarakat dengan instansi terkait selama perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru
						29 Koordinasi, operasi penertiban dan pengawasan ketentraman dan ketertiban Kota Balikpapan
						30 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Balikpapan Dalam Rangka Pemilukada
		6 Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan	8 Persentase capaian program/kegiatan strategis	80%	15 Program Pengembangan Sistem Pelaporan	31 Pengendalian kegiatan APBD
						32 Operasional Tim SIMONTEPRA Kota Balikpapan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan
						33 Verifikasi usulan kegiatan pemeliharaan infrastruktur Kota
						34 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Coastal Area
		7 Terwujudnya Pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan	9 Persentase Perizinan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	100%	16 Program Fasilitas dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	35 Sarana dan Prasarana Pendukung
						36 Operasional, Fasilitas dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota
						37 Penyusunan SOP pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan lingkungan hidup tata ruang dan tata bangunan
		8 Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	10 Indeks kepuasan pengadaan barang dan jasa Pemerintah	3.0	17 Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	38 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan
						39 Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan

NO	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Target		Program		Kegiatan			
							18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan			
3	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	9	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	11	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKjIP pada sub komponen Pelaporan kinerja dengan bobot nilai lebih dari sama dengan 10%	70%	19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	41	Pelaksanaan Kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			
											10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	12
		43	Pembinaan Pelayanan Publik										
		21	Program Penataan Kelembagaan	44	Evaluasi Ketatalaksanaan								
				45	Evaluasi Kelembagaan								
		46	Analisa Jabatan										
22	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	47	Rakor Orientasi dan Pembinaan Manajemen Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Balikpapan										

NO	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Target		Program		Kegiatan
							23	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	48	Pengembangan Sistem Pengelolaan Kepegawaian dan Disiplin PNS
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	11	Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah	13	Persentase Realisasi/Capaian Anggaran Setda sesuai Perencanaan	88%	24	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	49	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
							25	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	50	Evaluasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kota Balikpapan
									51	Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan
									52	Pemeliharaan rutin/berkala Aplikasi dan Peralatan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah
									53	Penyusunan Anggaran Sekretariat Daerah
									54	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan
						55 Fasilitasi Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Pendapatan Daerah
						56 Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah
			14 Indeks Kepuasan Pelayanan Sarana dan Prasarana	77	26 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	57 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air
						58 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
						59 Penyediaan Alat Tulis Kantor
						60 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						61 Penyediaan Makanan dan Minuman
						62 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
						63 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
						64 Penyediaan Jasa Kebersihan dan pemeliharaan Taman Kantor

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	
					27	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	65 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
							66 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan
							67 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
							68 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
							69 Penyediaan Jasa, Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Gedung Kantor
							70 Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Rumah Jabatan
							71 Penyediaan Jasa dan Fasilitas Dukungan Kegiatan Pemerintah Kota
							72 Rehabilitasi dan Revisi Instalasi Jaringan Listrik Bangunan Aset Pemerintah
							73 Penyediaan Bahan Bakar kendaraan dinas/operasional dan peralatan lainnya

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan			
					30	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	74	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	
					31	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	75	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	
							76	Fasilitasi Dukungan Pelayanan Tamu Pemerintah Kota	
			15	Indeks Kepuasan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	81	32	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	77	Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa
							78	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan	
					33	Pelayanan Administrasi Perkantoran	79	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	
					34	Program Penyeberluasan Informasi Daerah	80	Informasi Publik Pimpinan	
					35	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	81	Pelaksanaan Acara, Audiensi, Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Balikpapan	
					36	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	82	Peningkatan Kualitas / Mutu Paduan Suara Pemerintah Kota Balikpapan	

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan
				37	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan HUT Kemerdekaan RI
				38	Program Hari Jadi Kota	Pelaksanaan Hari Jadi Kota
				83		
				84		

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017-2021

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Hasil EKPPD terhadap LPPD dari Kemendagri	Bagian Pemerintahan
2	Meningkatnya fasilitas dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama	2	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah	Jumlah Perikatan/kerjasama yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah perikatan/kerjasama yang ditandatangani	Data Perikatan Kerjasama Pemerintah Kota Balikpapan	Bagian Perkotaan
3	Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum	3	Persentase Rancangan Produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum sesuai mekanisme dibandingkan dengan jumlah produk hukum yang ditetapkan pada tahun berjalan	Data rancangan produk hukum yang diharmonisasikan dan diterbitkan	Bagian Hukum
		4	Hasil capaian penilaian implementasi HAM	Perpres No. 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi HAM tahun 2015 - 2019	Hasil penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Panitia RANHAM nasional	Hasil penilaian implementasi HAM dari Kemendum dan HAM	Bagian Hukum
4	Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota	5	Nilai Kontribusi BUMD Terhadap PAD/Investasi	Permendagri No. 3 tahun 1998 tentang bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah kontribusi BUMD tahun berjalan	Laporan Realisasi Anggaran Kota Balikpapan	Bagian Perekonomiar
		6	Persentase Inflasi Kota Balikpapan	Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018	Angka inflasi di Kota Balikpapan yang dikeluarkan secara resmi dari Badan Pusat Statistik	Angka Inflasi dari BPS	Bagian Perekonomiar
5	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat	7	Persentase peningkatan sawadaya masyarakat	Untuk mengetahui peningkatan nilai swadaya masyarakat dalam pembangunan	Nilai swadaya masyarakat yang dihimpun dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Daya Jumlah Swadaya Masyarakat yang dihimpun dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Bagian pemerintahan Bgaian Kesra

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
6	Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan	8	Persentase capaian program/ kegiatan strategis	PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi program dan kegiatan strategis dibandingkan dengan jumlah program dan kegiatan yang direncanakan	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kota Balikpapan	Bagian Administrasi Pembangunan
7	Terwujudnya Pengendalian Pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan	9	Persentase perizinan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	Adanya UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Jumlah perizinan yang dikeluarkan dikurangi dengan jumlah pelanggaran perizinan dibandingkan dengan jumlah perizinan yang telah dikeluarkan	Laporan Monitoring dan evaluasi pemanfaatan tata ruang	Bagian Perkotaan
8	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	10	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No, 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua tentang Perpres no. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah nilai survey kepuasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Hasil survey kepuasan terhadap penyedia dan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	11	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKJIP pada sub komponen pelaporan kinerja lebih dari sama dengan 5% (Nilai Baik)	Adanya PermenPAN RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil evaluasi AKIP komponen pelaporan kinerja perangkat daerah sesuai dengan Permenpan Nomor 20 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi AKIP	Hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat	Bagian Organisasi
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	12	Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan	Adanya Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dibagi jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan survey	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap Unit Pelayanan Publik	Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan
11	Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah	13	Persentase realisasi/capaian anggaran Setda sesuai perencanaan	Adanya Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual	Jumlah realisasi belanja operasional dibandingkan dengan jumlah rencana belanja	Laporan Keuangan Setda	Bagian Keuangan

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
		14	Indeks Kepuasan pelayanan Sarana dan Prasarana	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah	Jumlah nilai Survey Kepuasan terhadap layanan sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Wali Kota Balikpapan	Hasil Survey Kepuasan terhadap layanan sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Wali Kota Balikpapan	Bagian Umum dan Perlengkapan
		15	Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokolkan	Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolkan	Jumlah nilai survey kepuasan terhadap layanan kehumasan dan acara keprotokolkan	Hasil survey kepuasan terhadap layanan kehumasan dan acara keprotokolkan	Bagian Humas dan Protokol, Bagian Pemerintahan dan Bagian Perkotaan

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

Rencana Kerja Tahunan adalah rencana selama setahun yang disusun untuk menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh jajaran sekretariat daerah Kota Balikpapan dan pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.4.
RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Nilai LPPD
2	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama	2 Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti
3	Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum	3 Persentase Rancangan Produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah
		4 Hasil capaian penilaian implementasi HAM
4	Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota	5 Nilai Kontribusi BUMD Terhadap PAD/Investasi
		6 Persentase Inflasi Kota Balikpapan
5	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat	7 Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat
6	Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan	8 Persentase capaian program/kegiatan strategis

7	Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan	9	Persentase perizinan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan
8	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	10	Indeks Kepuasan pengadaan barang dan jasa Pemerintah
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	11	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKjIP pada sub komponen pelaporan kinerja lebih dari sama dengan 10% (nilai baik)
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	12	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan
11	Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah	13	Persentase realisasi/capaian anggaran Sekretariat Daerah sesuai perencanaan
		14	Indeks Kepuasan pelayanan Sarana dan Prasarana
		15	Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokolan

C. PERJANJIAN KINERJA 2018

Dokumen perjanjian kinerja adalah dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit/organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. perjanjian kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dokumen perjanjian kinerja disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara lebih realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata sudah akan diperoleh.

Seiring dengan perkembangan APBD Kota Balikpapan dan hasil penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, bahwa perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tahun 2018 mengalami perubahan seiring dengan perjanjian APBD Perubahan Tahun 2018.

Secara rinci, perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Nilai LPPD	3,0 (Sangat Tinggi)
2	Meningkatnya fasilitas dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama	2 Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%
3	Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum	3 Persentase Rancangan Produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%
		4 Hasil capaian penilaian implementasi HAM	91
4	Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota	5 Nilai Kontribusi BUMD Terhadap PAD/Investasi	10 M
		6 Persentase Inflasi Kota Balikpapan	5±1%
5	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat	7 Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	6%
6	Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan	8 Persentase capaian program/kegiatan strategis	80%
7	Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan	9 Persentase perizinan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	80%
8	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	10 Indeks Kepuasan pengadaan barang dan jasa Pemerintah	3.0
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	11 Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKJIP pada sub komponen pelaporan kinerja lebih dari sama dengan 10% (nilai baik)	70%
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	12 Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan	74
11	Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah	13 Persentase realisasi/capaian anggaran Sekretariat Daerah sesuai perencanaan	88%
		14 Indeks Kepuasan pelayanan Sarana dan Prasarana	77
		15 Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokolan	81

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	26,958,461,500.00	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	26,082,200,000.00	APBD
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	699,500,000.00	APBD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	456,157,000.00	APBD
5	Pengembangan Sistem Pelaporan	596,069,500.00	APBD
6	Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	354,945,000.00	APBD
7	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1,807,000,000.00	APBD
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Membangun Kelurahan	756,308,000.00	APBD
9	Keluarga Berencana		APBD
10	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	406,180,000.00	APBD
11	Penyebarluasan Informasi Daerah	514,100,000.00	
12	Pembinaan dan Permasalahatan Olahraga	152,406,250.00	APBD
13	Pengelolaan Keberagaman Budaya	2,316,950,000.00	APBD
14	Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana	369,000,000.00	
15	Perencanaan Pembangunan Daerah	156,000,000.00	APBD
16	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,187,630,500.00	APBD
17	Pengendalian Inflasi	295,915,000.00	APBD
18	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	105,000,000.00	APBD
19	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	220,000,000.00	APBD
20	Penataan Kelembagaan	611,725,000.00	APBD
21	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	15,045,000,000.00	APBD
22	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,192,160,000.00	APBD

23	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	2,653,181,900.00	APBD
24	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	995,185,000.00	APBD
25	Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan	146,895,000.00	APBD
26	Bantuan Hukum dan HAM	866,672,400.00	APBD
27	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1,032,120,000.00	APBD
28	Layanan Pengadaan Barang & Jasa	516,450,000.00	APBD
29	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	775,131,200.00	APBD
30	Penataan Daerah Otonomi Baru	181,500,000.00	APBD
31	Hari Jadi Kota	2,800,000,000.00	APBD
32	Pemeliharaan Kantramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2,380,220,000.00	APBD
	JUMLAH	93,496,310,100.00	

3. Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 128,548,210,100,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp.125,197,786,898,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 26,030,281,000,- dan Belanja Langsung Rp. 99,166,897,350,-. Adapun realisasi anggaran sebesar 113,046,533,638,- (90,29%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp. 24,801,604,213,- (95,28%) belanja langsung sebesar Rp. 88,244,929,425,- (88,98%).

4. Target Belanja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Tabel 2.6

Target Belanja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Tidak Langsung	26,030,281,000	24,801,604,213	95,28
2	Belanja Langsung	99,166,897,350	88,244,929,425	88,98
	Jumlah	125,197,786,898	113,046,533,638	90,29

5. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	146.895.000	0.15	
2	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama	956.631.200	0.96	
3	Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum	2.153.839.400	2.17	

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
4	Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota	1.338.629.000	1.34	
5	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat	10.610.816.150	10.70	
6	Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan	1.103.500.000	1.11	
7	Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan	354.945.000	0.36	
8	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	877.600.000	0.88	
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	156.000.000	0.16	
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.613.352.100	3.64	
11	Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah	76.184.469.550	78.51	

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya**

Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan evaluasi atas implementasi AKIP di Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk Tahun 2017. Hasil Evaluasi AKIP Setda memperoleh nilai 68,05 atau predikat B. Adapun rincian penilaian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.**Rincian Penilaian Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2017**

No	Komponen Yang Dinilai	2017	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,25
2	Pengukuran Kinerja	25	14,38
3	Pelaporan Kinerja	15	12,93
4	Evaluasi Internal	10	2,42
5	Capaian Kinerja	20	12,07
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,05
	Predikat Akuntabilitas Kinerja		B

Saran perbaikan yang diberikan oleh oleh evaluator adalah sebagai berikut :

1. Mempublikasikan Dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama ke website sebagai wujud transparansi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Manajemen Sekretariat Daerah Kota Balikpapan mendokumentasikan bukti-bukti dilakukannya monitoring pelaksanaan Rencana Aksi dan bukti-bukti dimanfaatkannya Rencana Aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
3. Manajemen Sekretariat Daerah Kota Balikpapan melakukan pengumpulan data kinerja secara bulanan/triwulanan/semestera atas progress Rencana Aksi
4. Manajemen Sekretariat Daerah Kota Balikpapan mengembangkan teknologi dalam melakukan pengukuran capaian kinerja
5. Manajemen Sekretariat Daerah Kota Balikpapan mendokumentasikan bukti-bukti pemantauan/pengukuran pencapaian target kinerja secara berkala

6. Manajemen Sekretariat Daerah Kota Balikpapan mendokumentasikan bukti-bukti dilaksanakannya evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dan pengkomunikasian hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Dari seluruh komponen penilaian, nilai evaluasi atas evaluasi internal memiliki nilai paling rendah, hal ini menunjukkan bahwa kualitas evaluasi internal masih perlu diperbaiki lagi dengan membuat mekanisme standar dan terdokumentasi dalam melakukan evaluasi program untuk meningkatkan kinerja dan melakukan pemantauan dan evaluasi dari Rencana Aksi dalam rangka memaksimalkan kinerja organisasi.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 sebanyak 11 (Sebelas) Sasaran Strategis dengan 15 (Lima Belas) Indikator Kinerja.

Tahun 2018 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Nilai LPPD	Angka	3,0	Triwulan I			
						Triwulan II	3.0	3.16	105,33
						Triwulan III			
						Triwulan IV			
2	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama	2	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	Triwulan I			
						Triwulan II			
						Triwulan III			
						Triwulan IV	100%	95%	95
3	Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum	3	Persentase Rancangan Produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Persentase	100%	Triwulan I			
						Triwulan II			
						Triwulan III			
						Triwulan IV	100%	100%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4	Hasil capaian penilaian implementasi HAM	Angka	90	Triwulan I			
						Triwulan II			
						Triwulan III			
						Triwulan IV	91	79.77	87.66
4	Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota	5	Nilai Kontribusi BUMD Terhadap PAD/Investasi	Rupiah	10 M	Triwulan I			
						Triwulan II			
						Triwulan III			
						Triwulan IV	10 M	6.884.333.478	68.84
		6	Persentase Inflasi Kota Balikpapan	Persentase	5±1%	Triwulan I			
						Triwulan II			
						Triwulan III			
						Triwulan IV	5,00	3.13	137.4
5	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat	7	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	Persentase	5,50%	Triwulan I			
						Triwulan II			
						Triwulan III			
						Triwulan IV	6	5.06	84.33
6	Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan	8	Persentase capaian program/kegiatan strategis	Persentase	80%	Triwulan I	5.00	4.79	
						Triwulan II	20.00	17.20	
						Triwulan III	25.00	18.75	
						Triwulan IV	30.00	29.32	80.00
7	Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan	9	Persentase perizinan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	Persentase	80%	Triwulan I	20.00	15.00	
						Triwulan II	20.00	15.00	
						Triwulan III	20.00	20.00	
						Triwulan IV	20.00	25.00	75.00
8	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	10	Indeks Kepuasan pengadaan barang dan jasa Pemerintah	Angka	3,0	Triwulan I			
						Triwulan II			
						Triwulan III	3.38		112,67
						Triwulan IV			
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	11	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKJIP pada sub komponen pelaporan kinerja lebih dari sama dengan 10% (nilai baik)	Persentase	65%	Triwulan I			
						Triwulan II			
						Triwulan III	70	72.22	103.17
						Triwulan IV			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	12	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan	Angka	73	Triwulan I				
						Triwulan II				
						Triwulan III	74.00	78.78	106.46	
						Triwulan IV				
11	Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah	13	Persentase realisasi/capaian anggaran Sekretariat Daerah sesuai perencanaan	Persentase	87%	Triwulan I	22.00	16.72		
						Triwulan II	22.00	24.91		
						Triwulan III	22.00	21.86		
						Triwulan IV	22.00	27.00	90.49	
		14	Indeks Kepuasan pelayanan Sarana dan Prasarana	Angka	75	Triwulan I	77.00	73.31	95.21	
						Triwulan II				
						Triwulan III				
						Triwulan IV				
		15	Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokolan	Angka	80	Triwulan I				
						Triwulan II	81.00	77.73	95.96	
						Triwulan III				
						Triwulan IV				

C. Analisis Capaian Kinerja

Adanya analisis capaian kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang. Faktor pendukung utama yang mendukung upaya pencapaian kinerja di Sekretariat Daerah adalah ketersediaan dana untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target sasaran.

Selanjutnya Analisis Capaian Kinerja pada setiap sasaran dan indikator pada tahun 2018 adalah sebagaimana berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 1) Analisis Pencapaian Sasaran dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

Tabel 3.3.

Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Nilai LPPD	Angka	3.0	3.16	105,33

Untuk Indikator Kinerja Nilai LPPD diambil dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Target yang ditetapkan untuk Nilai LPPD adalah pada angka 3,0 dan realisasi yang diperoleh untuk tahun 2016 yang diumumkan di tahun 2018 adalah nilai pada angka 3,16 atau 105,33%. Dari hasil pengukuran diperoleh capaian kinerja Sasaran adalah 110% atau melebihi target.

- 2) Analisis Pencapaian Sasaran Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4.

Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2018
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7 (6-5/5*100%)
1	Nilai LPPD	Angka	3.2	3.3	3.16	-4.24

- 3) Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5.

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai LPPD	Angka	3.0	3.16	105,33%

4) Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.6.

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai LPPD	Angka	3.16	-	

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah dalam rangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Nilai LPPD Kota Balikpapan pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2018 adalah sebesar 3.16 dengan

kategori Sangat Tinggi. Keberhasilan dari pencapaian indikator kinerja ini adalah karena adanya komitmen dari Kepala Perangkat Daerah untuk menyerahkan data pendukung LPPD tepat pada waktunya.

Berdasarkan peringkat pada status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan pada 93 (Sembilan Puluh Tiga) Daerah Kota secara Nasional, Nilai LPPD Kota Balikpapan Tahun 2017 berada pada urutan 24. Sedangkan pada tingkat Propinsi Kalimantan Timur berada pada urutan ke 5 dari 10 daerah Kabupaten/Kota.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai LPPD antara lain mendorong Perangkat Daerah untuk memenuhi Indikator Kinerja Kunci dengan akurat dan tepat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri.

- 6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dapat dijelaskan

Untuk menunjang Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah didukung oleh Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Balikpapan, dengan pagu anggaran Rp. 146.895.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 114.732.625,- atau 78 %

- 7) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7.

Analisis Pencapaian Sasaran 1 atas efisiensi penggunaan sumber daya
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	105,33	78	27.33

2. Sasaran 2 : Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama

- a. Analisis Pencapaian Sasaran dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

Tabel 3.8.

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama
Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	95	95

Pada indikator persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti, untuk tahun 2018 telah ditetapkan besaran target yang harus dicapai yaitu sebesar 100%, yang diukur berdasarkan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah Perikatan Kerjasama}} \times 100\%$$

(persentase jumlah perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan perikatan kerjasama)

Dalam hal ini naskah kerjasama aktif dibatasi pada naskah kerjasama yang jangka waktu kerjasamanya masih berlaku pada tahun anggaran yang bersangkutan, dengan data perikatan kerjasama didasarkan pada data perikatan kerjasama yang terinventarisir dan terdokumentasikan pada Bagian Perkotaan yaitu Perikatan Kerjasama yang dibuat pada tahun 2007.

Jika dibandingkan dengan target capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2018 sebesar 100%, maka capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama dengan indikator persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti mencapai target sebesar 95%.

- b. Analisis Pencapaian Sasaran Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.9.

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama Dan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2017
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7 (6-5/5*100%)
1	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	95	95	0

- c. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.10

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama Dan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	95	95%

- d. Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.11.

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama

Dan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	95	-	

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Yang dimaksud dengan Perikatan Kerjasama yang sudah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan adalah :

- Minimal satu dari seluruh ruang lingkup Nota Kesepahaman atau Kesepakatan Bersama Aktif ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, atau
- Minimal satu dari seluruh ruang lingkup Perjanjian Kerjasama Aktif dalam naskah perikatan kerjasama ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam bentuk tindakan nyata dalam Program/Kegiatan Perangkat Daerah
- Minimal satu dari seluruh ruang lingkup nota kesepahaman atau Kesepakatan Bersama Aktif ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam bentuk tindakan nyata dalam Program/Kegiatan Perangkat Daerah walaupun tidak/belum ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama

Penyebab keberhasilan dari pencapaian kinerja Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti adalah adanya komitmen dari Kepala Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti perikatan kerjasama yang telah disepakati. Adapun terdapat pula Perangkat Daerah yang tidak melanjutkan kerjasama dikarenakan ketidaksesuaian dengan kondisi yang ada di Perangkat Daerah.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah agar setiap perikatan kerjasama dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dapat dijelaskan

Untuk menunjang Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah didukung oleh Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan Kegiatan Penataan Administrasi Wilayah dengan pagu anggaran Rp. 956.631.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 655.699.995,- atau 69%.

- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.12.

Analisis Pencapaian Sasaran 2 atas efisiensi penggunaan sumber daya Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	95	69	26

3. Sasaran 3 : Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum

- a. Analisis Pencapaian Sasaran dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

Tabel 3.13.

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum
Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Rancangan Produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100	100	100
2	Hasil capaian penilaian implementasi HAM	Angka	91	79,77	87,66

Pada indikator persentase Rancangan Produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah, untuk tahun 2018 telah ditetapkan besaran target yang harus dicapai yaitu sebesar 100%, yang diukur berdasarkan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah rancangan produk hukum daerah yang sesuai mekanisme}}{\sum \text{Jumlah rancangan produk hukum}} \times 100\%$$

(persentase jumlah rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dibandingkan dengan jumlah rancangan produk hukum)

Berdasarkan hasil pengukuran diketahui rata-rata capaian kinerja Persentase Rancangan Produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah tercapai 100%

Sementara untuk hasil capaian penilaian implementasi HAM adalah hasil penilaian dari KemenkumHAM dimana untuk target nilai dengan skor 91, hanya mendapatkan nilai 79,77 atau tercapai 87,66%.

Rata-rata capaian Sasaran Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum adalah 93.83%

- b. Analisis Pencapaian Sasaran Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.14.

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum Dan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2017
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7 (6-5/5*100%)
1	Persentase Rancangan Produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100	100	100	0
2	Hasil capaian penilaian implementasi HAM	Angka	77.21	85.79	87.66	2.18

- c. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.15.

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum Dan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Persentase	%	100	100	100%

	Rancangan Produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah				
2	Hasil capaian penilaian implementasi HAM	Angka	91	79.77	87.66

d. Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.16.

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum

Dan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Rancangan Produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100	-	
2	Hasil capaian penilaian implementasi HAM	Angka	79.77	-	

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator Persentase Rancangan Produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah adalah Mekanisme pembentukan Produk Hukum sesuai dengan Ketentuan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah membutuhkan proses beberapa tahap dan sehingga untuk menetapkan suatu rancangan Perda atau Perwali melalui proses yang panjang

Langkah diambil untuk mendukung capaian kinerja adalah :

- 1) Membentuk Tim Harmonisasi yang melibatkan Kemenkumham
- 2) Melaksanakan fasilitasi rancangan Perda dan Perwali di Pemprov Kaltim
- 3) Setiap produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dilakukan pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Seluruh produk hukum daerah yang telah diterbitkan dilakukan evaluasi
- 5) Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat melalui publikasi produk hukum dan penyuluhan hukum
- 6) Seluruh Produk Hukum daerah yang sudah diterbitkan telah disosialisasikan dan dipublikasikan setiap tahun melalui media JDIH online, di <http://jdih.balikpapan.go.id>

Sementara untuk pencapaian indikator Nilai Implementasi HAM faktor penghambat yang kerap ditemui adalah kurangnya bukti atas data pendukung penilaian, dan langkah yang diambil adalah :

- 1) Melakukan Rapat Koordinasi RANHAM
- 2) Melakukan koordinasi ke PD terkait sehubungan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia
- 3) Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum dan HAM bagi Aparatur dan masyarakat melalui peningkatan intensitas sosialisasi dan publikasi dan penyuluhan hukum terpadu
- 4) Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum yang mudah dan cepat

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dapat dijelaskan :

Untuk menunjang Sasaran Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum didukung oleh Program Penataan Peraturan Perundang - undangan dengan Kegiatan Harmonisasi Sinkronisasi Produk Hukum Daerah, Kegiatan Kodifikasi dan Penataan Dokumentasi Hukum dan Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Kota Balikpapan dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 1.287.167.000,- dan realisasi sebesar Rp. 997.761.027,- atau 78%. Selanjutnya Program Bantuan Hukum dan HAM dengan Kegiatan Proses Penyelesaian Perkara dan pemberian Bantuan Hukum dan Kegiatan Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Kota Balikpapan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 866.672.400,- dan realisasi sebesar Rp. 278.693.325,- atau 32%.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.17.

Analisis Pencapaian Sasaran 3 atas efisiensi penggunaan sumber daya Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6 (4-5)
1	Persentase Rancangan Produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100	78	22
2	Hasil capaian penilaian implementasi HAM	79,77	32	47.77

4. Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota

a. Analisis Pencapaian Sasaran dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

Tabel 3.18.

Analisis Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota
Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Kontribusi BUMD Terhadap PAD/Investasi	Rp	10 M	6,884,333,478,00	68,84
2	Persentase Inflasi Kota Balikpapan	%	5±1%	3,13	137,40

Pada indikator Nilai Kontribusi BUMD Terhadap PAD/Investasi dilihat dari laporan tahunan BUMD Kota Balikpapan tahun 2018 dimana dapat terlihat besaran kontribusi dari BUMD Kota Balikpapan yaitu PDAM dan Perusda terhadap PAD Pemerintah Kota Balikpapan dimana telah ditetapkan target sebesar Rp. 10.000.000.000,-. Berdasarkan hasil pelaporan dari BUMD diperoleh nilai realisasi kontribusi terhadap PAD adalah Rp. 76,884,333,478,- atau tercapai 68,84%.

Sementara pada indikator persentase inflasi Kota Balikpapan, untuk tahun 2018 telah ditetapkan besaran target yang harus dicapai yaitu sebesar 5±1%, yang diukur berdasarkan formulasi perhitungan dari Badan Pusat Statistik dengan metode penghitungan inflasi Year on Year, tercapai nilai inflasi adalah berada pada angka 3,13 atau meningkat 137,40%

Rata-rata capaian sasaran Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota adalah 103,12%.

- b. Analisis Pencapaian Sasaran Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.19.

Analisis Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota Dan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2017
			2015	2016	2018	
1	2	3	4	5	6	7 (6-5/5*100%)
1	Nilai Kontribusi BUMD Terhadap PAD/Investasi	Rp	9.153.284.184	7,455,935,578,00	6,884,333,478,00	7.67
2	Persentase Inflasi Kota Balikpapan	%	3.61	2.45	3.13	-27.76%

- c. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.20.

Analisis Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota Dan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Kontribusi	Rp	10 M	6,884,333,478,00	68.84%

	BUMD Terhadap PAD/Investasi				
2	Persentase Inflasi Kota Balikpapan	%	4±1%	3.13	75%

d. Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.21.

Analisis Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan

Kota Dan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Kontribusi BUMD Terhadap PAD/Investasi	Rp	6,884,333,478,00	-	
2	Persentase Inflasi Kota Balikpapan	%	3,13	0,62	

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terkait tidak tercapainya indikator Nilai Kontribusi BUMD Terhadap PAD/Investasi sesuai target dikarenakan masih di prosesnya Perda Perusda terkait struktur dan usaha yang akan dilakukan Perusda.

Alternatif solusi yang diambil adalah:

- 1) Melakukan studi dan membuat Rancangan Peraturan Daerah terkait review Peraturan Daerah penyertaan modal PDAM dan review penyertaan modal perusda serta review Perda PDAM
- 2) Melaksanakan fasilitasi dan rapat koordinasi terkait Perusda PDAM

Sementara untuk Indikator Kinerja Persentase Inflasi Kota Balikpapan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang melebihi target hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi lintas sektoral melalui TPID
 2. Menjaga ekspektasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan pada hari-hari besar keagamaan dengan menginformasikan stock dan menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dan cerdas berbelanja melalui media elektronik, media cetak maupun spanduk di pasar dan ruang publik agar tidak berbelanja berlebihan
 3. Melakukan pencatatan harga setiap hari di 5 pasar rakyat di Balikpapan yang diinformasikan di website Pusat Informasi Pangan Strategis
 4. Melakukan penandatanganan komitmen distributor untuk menjaga stok dan harga di tingkat kewajaran saat menjelang hari raya besar
 5. Melakukan sidak pasar dan pasar murah yang dilaksanakan bekerjasama dengan Distributor dan BI dan melakukan safari sembako berbarengan dengan Safari Ramadhan Wali Kota
 6. Membuat himbauan kepada pengusaha perhotelan atau pengusaha lainnya untuk dapat melakukan Pasar Murah di daerah sekitar tempat usaha
 7. Membuat surat edaran/himbauan kepada sekolah yang ditandatangani Wali Kota agar dalam penerimaan siswa baru mengenakan biaya yang wajar dan dalam batas kepatutan
 8. Pelaksanaan Sekolah Peduli Inflasi, Pesantren Peduli Inflasi dan pembagian bibit cabe kepada masyarakat
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dapat dijelaskan :

Untuk menunjang Sasaran Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Potensi BUMD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 473.714.000,- dan realisasi sebesar Rp. 433.907.078,- atau 92% dan Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan sarana Prasarana dengan Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengawasan Pengembangan sarana prasarana Perekonomian Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 369.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 308.366.500,- atau 84% serta Program Pengendalian Inflasi dengan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah dan Kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Evaluasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dengan pagu anggran sebesar Rp.

295.915.000,- dan realisasi sebesar Rp. 151.623.304,- atau 51% serta Program Pengembangan City Gas dengan Kegiatan Survei Pengembangan Jaringan Gas Rumah Tangga dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- dan realisasi Rp. 195.554.000,- atau 98%

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.22.

Analisis Pencapaian Sasaran 4 atas efisiensi penggunaan sumber daya
Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6 (4-5)
1	Nilai Kontribusi BUMD Terhadap PAD/Investasi	68.84	88	-19.16
2	Persentase Inflasi Kota Balikpapan	137.40	70	67.4

5. Sasaran 5 : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat

a. Analisis Pencapaian Sasaran dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

Tabel 3.23.

Analisis Pencapaian Sasaran 5
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	%	6	5.06	84.33

Pada indikator persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat, untuk tahun 2018 telah ditetapkan besaran target yang harus dicapai yaitu sebesar 6%, yang diukur berdasarkan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Nilai Swadaya tahun berjalan} - \sum \text{Nilai Swadaya tahun lalu} \times 100\%}{\sum \text{Nilai Swadaya tahun lalu}}$$

(Nilai swadaya masyarakat tahun berjalan yang telah dikurangi nilai swadaya masyarakat tahun lalu dibandingkan dengan nilai swadaya masyarakat tahun lalu)

- b. Analisis Pencapaian Sasaran Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.24.

Analisis Pencapaian Sasaran 5

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat Dan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2017 7 (6-5/5*100%)
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	%	5.15	-5,40	5.06	1.93%

- c. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.25.

Analisis Pencapaian Sasaran 5

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat Dan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6

1	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	%	7	5.06	27.71%
---	---	---	---	------	--------

- d. Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.26.
Analisis Pencapaian Sasaran 5

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
Dan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	%	5.06	-	

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat, maka akan mengurangi masalah-masalah yang ada.

Tingkat Swadaya masyarakat untuk tahun 2018 meningkat dari periode tahun 2017. Pada tahun 2017 Nilai Swadaya masyarakat adalah 88.615.487.049,- sedangkan Nilai Swadaya masyarakat pada tahun 2018 adalah Rp. 93.338.387.000,-.

Nilai swadaya meningkat seiring banyaknya kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan, namun dirasakan masih kurang luasnya cakupan pendataan swadaya masyarakat sehingga kemungkinan masih ada kegiatan swadaya yang tidak terdata.

Alternatif solusi yang diambil adalah :

- 1) melakukan pembinaan kepada Kecamatan dan Kelurahan untuk mengaktifkan pengisian Buku Swadaya di setiap kegiatan masyarakat.
 - 2) Melakukan pembinaan melalui Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang meliputi penilaian swadaya bidang kemasyarakatan, bidang Ekonomi, bidang Sosial, Budaya dan Agama dan bidang lingkungan.
 - 3) Melakukan pembinaan kepada Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata untuk mendorong kegiatan kemasyarakatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat
 - 4) Melakukan pembinaan melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yaitu LPM dan PKK untuk aktif mendorong kegiatan masyarakat di wilayahnya.
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk menunjang Sasaran Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat didukung oleh Program Keluarga Berencana dengan Kegiatan Pemilihan Keluarga Sakinah, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani, Program Peningkatan pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan Kegiatan Penguatan peran PKK melalui fungsi Kesekretariatan TP. PKK Kota, Kegiatan Penguatan Peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui POKJA I, Kegiatan Penguatan peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui POKJA II, Kegiatan Penguatan peran PKK dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui POKJA III, Kegiatan Penguatan peran PKK dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui POKJA IV, Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Balikpapan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan dengan Kegiatan Pelaksanaan BBGRM dan Penilaian Kelurahan Terbaik Tingkat Kota Balikpapan, Kegiatan Pembinaan Posyandu, Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat melalui peran mahasiswa kuliah nyata (KKN), Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial dengan kegiatan Kegiatan Pengelolaan beasiswa stimulan pendidikan tinggi Kota Balikpapan, Kegiatan Pengadaan Natura Pondok Pesantren, Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji, Kegiatan Safari jum'at dan Safari Ramadhan, Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama Islam, Kegiatan Tabligh Akbar dalam rangka HUT Kota Balikpapan, Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Kegiatan Kegiatan Koordinasi Ketertiban Umum dan Ketentraman, Perlindungan

Masyarakat dengan instansi terkait selama Perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru, Kegiatan Dukungan Operasional Pembongkaran Bangunan Eks. Lokalisasi Km. 17, Kegiatan Koordinasi Operasi Penertiban dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Kota Balikpapan dengan pagu anggaran Rp. 10.610.816.150,- dan realisasi sebesar Rp. 9,448,708,055,- atau 89%.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.27.

Analisis Pencapaian Sasaran 4 atas efisiensi penggunaan sumber daya
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6 (4-5)
1	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	84,33	89	-4.67

6. Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan

a. Analisis Pencapaian Sasaran dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

Tabel 3.28.

Analisis Pencapaian Sasaran 6

Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase capaian program/kegiatan strategis	%	80	70,06	87,58

Pada indikator Persentase capaian program/kegiatan strategis, untuk tahun 2018 telah ditetapkan besaran target yang harus dicapai yaitu sebesar 80%, yang diukur berdasarkan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Realisasi program dan kegiatan strategis}}{\sum \text{Program dan kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

(Jumlah realisasi program dan kegiatan strategis dibandingkan dengan jumlah program dan kegiatan yang direncanakan)

Berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan dengan indikator kinerja Persentase capaian program/kegiatan strategis capaian kinerja adalah 100%.

- b. Analisis Pencapaian Sasaran Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.29.

Analisis Pencapaian Sasaran 6

Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan

Dan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2017
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7 (6-5/5*100%)
1	Persentase capaian program/kegiatan strategis	%	80	80	70.06	-12.43

- c. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.30.

Analisis Pencapaian Sasaran 6

Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan

Dan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Persentase capaian program/kegiatan strategis	%	80	70.06	87.58

- d. Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.31.

Analisis Pencapaian Sasaran 6

Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan
Dan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase capaian program/kegiatan strategis	%	80	-	

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor penghambat yang kerap ditemui dalam meningkatkan capaian kinerja adalah :

- 1) Keterlambatan pelaporan data pertanggungjawaban keuangan dari BPKD
- 2) Adanya perubahan data laporan pertanggungjawaban keuangan dari BPKD
- 3) Pada Resume realisasi keuangan Kota Seringkali tidak sinkron antar data dari BPKAD dan Data dari Form C1 dalam Aplikasi Simonteptra
- 4) Belum adanya keseragaman pemahaman untuk perhitungan realisasi fisik pekerjaan
- 5) Terdapat Perangkat Daerah yang kurang memperhatikan surat edaran Wali Kota Balikpapan tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan
- 6) PPTK terlambat dalam memberikan data realisasi kegiatan pada operator aplikasi Simonteptra sehingga terjadi keterlambatan dalam proses updating data
- 7) Dalam melakukan perhitungan realisasi fisik belum memasukkan perhitungan bobot pekerjaan
- 8) Monitoring Lelang melalui LPSE pada Simonteptra belum bisa realtime
- 9) Belum diberlakukannya mekanisme reward dan punishment bagi Perangkat Daerah yang terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi kegiatan

Alternatif solusi yang telah diambil adalah :

- 1) Melakukan rapat koordinasi internal Bagian Administrasi Pembangunan
- 2) Mengadakan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD dengan Perangkat Daerah

- 3) Mengeluarkan surat edaran Wali Kota Balikpapan tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah
 - 4) Melakukan koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD ke Instansi Pusat terkait
 - 5) Melakukan Updating dan pengembangan sistem pelaporan (Simonteptra)
 - 6) Sistem jemput bola dengan datang langsung ke Perangkat Daerah untuk berkoordinasi terkait permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan
 - 7) Melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan/lokasi pelaksanaan kegiatan
 - 8) Konfirmasi dan koordinasi melalui media elektronik dengan Petugas operator Simonteptra untuk hasil realisasi fisik dan kegiatan
 - 9) Koordinasi dengan BPKD untuk sinkronisasi data realisasi keuangan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Balikpapan
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Untuk menunjang Sasaran Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan didukung Program Pengembangan Sistem Pelaporandengan Kegiatan Pengendalian Kegiatan APBD, Kegiatan Operasional Tim SIMONTEPPA Kota Balikpapan, Kegiatan Verifikasi Usulan Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kota dengan pagu anggaran Rp.1.103.500.000,- dan realisasi Rp. 781.449.563,- atau 71%.
- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.32.

Analisis Pencapaian Sasaran 6 atas efisiensi penggunaan sumber daya
Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Persentase capaian program/kegiatan strategis	87.58	71	16.58

7. Sasaran 7 : Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan

a. Analisis Pencapaian Sasaran dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

Tabel 3.33.

Analisis Pencapaian Sasaran 7

Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase perizinan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	%	80	75	93.75

Pada indikator Persentase perizinan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan, untuk tahun 2018 telah ditetapkan besaran target yang harus dicapai yaitu sebesar 80%, yang diukur berdasarkan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Perizinan yang dikeluarkan} - \text{Pelanggaran Perizinan}}{\sum \text{Perizinan Tata Ruang yang telah dikeluarkan}} \times 100\%$$

(Jumlah perizinan tata ruang yang dikeluarkan dikurangi dengan jumlah pelanggaran perizinan tata ruang dibandingkan dengan jumlah perizinan tata ruang yang telah dikeluarkan)

Berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja Sasaran Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan dengan indikator kinerja Persentase perizinan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan adalah 93.75%.

b. Analisis Pencapaian Sasaran Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.34.

Analisis Pencapaian Sasaran 7

Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan
Dan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2017
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7 (6-5/5*100%)
1	Persentase perizinan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	%	80	80	75	-5

- c. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.35.

Analisis Pencapaian Sasaran 7

Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan

Dan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Persentase perizinan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	%	80	75	6.25

- d. Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.36.

Analisis Pencapaian Sasaran 7

Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan

Dan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase perizinan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	%	75	-	

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sekretariat Daerah melalui Bagian Perkotaan melaksanakan fungsi sebagai Fasilitator dan koordinator dalam pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan. Perizinan sendiri dikeluarkan oleh dinas teknis dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR).

Permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah :

- 1) Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian perizinan pemanfaatan ruang dengan mengidentifikasi alur perizinan pemanfaatannya meliputi Site Plan, Izin Prinsip dan IMB yang belum terkoneksi dengan Izin Membuka Lahan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Izin Mengusasai Tanah Negara dari DPPR serta Amdal Lalin dari Dinas Perhubungan (Dishub)
- 2) Belum ditetapkannya Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai dasar penentu pelanggaran tata ruang

Alternatif Solusi yang dilakukan :

- 1) Melakukan koordinasi teknis secara kontinyudengan seluruh dinas teknis terkait pemanfaatan tata ruang agar terdapat satu kesamaan persepsi dalam pengawasan pemanfaatan tata ruang

- 2) Dalam melakukan pengawasan dan penindakan lebih banyak mengambil tindakan pencegahan dengan melakukan pembinaan kepada para penerima izin agar tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk menunjang Sasaran Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan didukung Program Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota dengan Kegiatan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Operasional, Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota dan Kegiatan Penyusunan SOP pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan lingkungan hidup tata ruang dan tata bangunan dengan pagu anggaran Rp. 354.945.000,- dan realisasi Rp. 238.633.814,- atau 67%.

- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.37.

Analisis Pencapaian Sasaran 7 atas efisiensi penggunaan sumber daya
Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Persentase perizinan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	93.75	67	26.75

8. Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
- a. Analisis Pencapaian Sasaran dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

Tabel 3.38.

Analisis Pencapaian Sasaran 8
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan pengadaan barang dan jasa Pemerintah	Angka	3,0	3,38	112,67

Untuk melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilakukan dengan melakukan survey terhadap penyedia (vendor) tentang kepuasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan target 3,0.

Dari hasil survey diperoleh realisasi Indeks Kepuasan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berada pada angka 3,38.

Berdasarkan hasil pengukuran maka Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa dengan Indeks Kepuasan pengadaan barang dan jasa Pemerintah adalah 112,67%.

- b. Analisis Pencapaian Sasaran Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.39.

Analisis Pencapaian Sasaran 8
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
Dan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2017
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7 (6-5/5*100%)
1	Indeks Kepuasan pengadaan barang dan jasa Pemerintah	Angka		3.38	3,38	0

- c. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.40.

Analisis Pencapaian Sasaran 8

Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Dan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan pengadaan barang dan jasa Pemerintah	Angka	4,0		

- d. Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.41.

Analisis Pencapaian Sasaran 8

Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Dan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan pengadaan barang dan jasa Pemerintah	Angka	3,38	0	0

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor pendukung dari peningkatan capaian kinerja adalah :

- 1) Komunikasi terjalin baik antara PBJ dengan Vendor maupun pelanggan internal/PD
- 2) Meningkatnya teknis pengadaan berkat adanya diklat-diklat yang diadakan oleh MCAI (Milenium Challenge Account Indonesia) maupun LKPP
- 3) Pelayanan pelanggan meningkat dengan ditetapkannya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai Centre of Excellent (CoE)

Faktor Penghambat yang ditemui adalah Jumlah SDM Pengadaan Barang dan Jasa yang masih kurang sehingga masih ada beberapa paket pengadaan langsung yang masih dilaksanakan oleh pejabat pengadaan di luar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Alternatif solusi yang telah diambil adalah bekerjasama dengan BKPSDM untuk mengangkat Pejabat Pengadaan

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk menunjang Sasaran Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan didukung Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan, Kegiatan Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Kegiatan Fasilitas Pengembangan ULP Percontohan dengan pagu anggaran Rp. 877.600.000,- dan realisasi Rp. 616.101.991,- atau 70%.

- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.42.

Analisis Pencapaian Sasaran 8 atas efisiensi penggunaan sumber daya
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6 (4-5)
1	Indeks Kepuasan pengadaan barang dan jasa Pemerintah		70	

9. Sasaran 9 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

a. Analisis Pencapaian Sasaran dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

Tabel 3.43.

Analisis Pencapaian Sasaran 9
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKjIP pada sub komponen pelaporan kinerja lebih dari sama dengan 10% (nilai baik)	%	70	72.22	103.17

Pada indikator Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKjIP pada sub komponen pelaporan kinerja lebih dari sama dengan 10% (nilai baik), untuk tahun 2018 telah ditetapkan besaran target yang harus dicapai yaitu sebesar 70%, yang diukur berdasarkan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKjIP pada sub komponen pelaporan kinerja} \geq 10\% \text{ (nilai Baik)}}{\sum \text{Perangkat Daerah Kota Balikpapan}} \times 100\%$$

(Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKjIP pada sub komponen Pelaporan Kinerja bernilai Baik dibandingkan dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah)

Berdasarkan pengukuran maka capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKjIP pada sub komponen pelaporan kinerja lebih dari sama dengan 10% (nilai baik) adalah mencapai 72.22% atau tercapai 103.17%

- b. Analisis Pencapaian Sasaran Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.44.

Analisis Pencapaian Sasaran 9

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Dan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2017
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7 (6-5/5*100%)
1	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKJIP pada sub komponen pelaporan kinerja lebih dari sama dengan 10% (nilai baik)	%	13.44	61,11	72.22	18.18

- c. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.45.

Analisis Pencapaian Sasaran 9

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Dan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKJIP pada sub komponen pelaporan kinerja lebih dari sama dengan 10% (nilai baik)	%	80	72.22	90.23

- d. Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.46.

Analisis Pencapaian Sasaran 9

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Dan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKjIP pada sub komponen pelaporan kinerja lebih dari sama dengan 10% (nilai baik)	Angka	72.22	-	-

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pemerintah telah menjalankan program Reformasi Birokrasi Nasional sejak tahun 2010. Dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui Permenpan No. 11 Tahun 2015 telah ditetapkan 3 sasaran dan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi 2015-2019. Salah satu dari 8 Area perubahan Reformasi Birokrasi tersebut adalah Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian Organisasi berupaya mendukung Pemerintah Kota dalam mencapai penguatan di bidang akuntabilitas kinerja.

Untuk tahun 2018 terdapat 26 Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai Baik dan Sangat Baik, walaupun demikian ada beberapa masalah mendasar yang menjadi factor penghambat dalam pelaksanaan SAKIP antara lain :

- 1) Masih kurangnya dukungan dan komitmen
- 2) Adanya resistensi terhadap perubahan

- 3) Lemahnya pemahaman terhadap akuntabilitas kinerja di PD
- 4) Kurangnya data kinerja

Untuk mengatasinya diambil beberapa alternatif solusi sebagai berikut :

- 1) Membuat Perjanjian Kinerja Khusus yang terkait dengan Kedisiplinan, Integritas dan pelayanan publik untuk memperkuat Perjanjian Kinerja yang sudah ada
 - 2) Melaksanakan Rapat koordinasi Tim SAKIP Pemkot Balikpapan yang terdiri dari Inspektorat, Bappeda litbang dan Bagian Organisasi serta Perangkat Daerah pendamping evaluasi AKIP Kota untuk memperkuat soliditas tim fasilitasi SAKIP dan Perangkat Daerah
 - 3) Dilaksanakannya Sosialisasi penyusunan LKjIP dan penyusunan IKU dan Cascading Kinerja serta Rencana Aksi kepada Sekretaris dan Kasubag Program atau Kasubag yang menangani perencanaan di Perangkat Daerah
 - 4) Mewajibkan kehadiran Kepala Perangkat Daerah pada saat Evaluasi AKIP Kota dari KEMENPAN RB
 - 5) Penerapan aplikasi SILAKIP yang diadopsi dari Pemkot Bandung sebagai sarana dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan SAKIP di Pemkot Balikpapan
 - 6) Melalui BKPSDM melakukan Bimtek SAKIP yang diikuti oleh Kasubag Program Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta dengan narasumber dari KEMENPAN RB
 - 7) Menghimbau seluruh Perangkat Daerah untuk memanfaatkan aplikasi e-SAKIP yang telah direplikasi dari Pemkot Bandung sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja
 - 8) Dalam tahapan menyusun Sistem Monev Capaian Kinerja Indikator Kinerja Individu yang diintegrasikan dengan SKP dan e-Kinerja.
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk menunjang Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah didukung Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dengan pagu anggaran Rp156.000.000,- dan realisasi Rp. 93.483.000,- atau 59.93%.

- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.47.

Analisis Pencapaian Sasaran 9 atas efisiensi penggunaan sumber daya
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6 (4-5)
1	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKjIP pada sub komponen pelaporan kinerja lebih dari sama dengan 10% (nilai baik)	103.17	59.93	43.24

10. Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

- a. Analisis Pencapaian Sasaran dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

Tabel 3.48.

Analisis Pencapaian Sasaran 10
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan	Angka	74	78,78	106.46

Pada indikator Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan untuk tahun 2018 telah ditetapkan besaran target yang harus dicapai yaitu pada angka rata-rata 74, yang diukur berdasarkan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Nilai IKM Perangkat Daerah yang melaksanakan SKM}}{\sum \text{Perangkat Daerah yang melaksanakan survey}} \times 100\%$$

(Jumlah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dibandingkan dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Survey)

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh realisasi angka yaitu 78.78, sehingga capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan adalah 106.46%.

- b. Analisis Pencapaian Sasaran Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.49.

Analisis Pencapaian Sasaran 10

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Dan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2018
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7 (6-5/5*100%)
1	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan	%	79.39	78.69	78,78	-0.12

- c. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

$$\frac{\sum \text{Nilai IKM Perangkat Daerah yang melaksanakan SKM}}{\sum \text{Perangkat Daerah yang melaksanakan survey}} \times 100\%$$

(Jumlah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dibandingkan dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Survey)

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh realisasi angka yaitu 78.78, sehingga capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan adalah 106.46%.

- b. Analisis Pencapaian Sasaran Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.49.

Analisis Pencapaian Sasaran 10

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Dan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2018
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7 (6-5/5*100%)
1	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan	%	79.39	78.69	78,78	-0.12

- c. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.50

Analisis Pencapaian Sasaran 10
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Dan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan	%	80	78,78	98,48

d. Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.51.

Analisis Pencapaian Sasaran 10
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Dan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan	Angka	78,78	-	

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan dimaksudkan untuk memberikan gambaran pemenuhan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Setelah melakukan berbagai upaya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka upaya selanjutnya adalah melakukan survei kepuasan masyarakat.

Survei kepuasan masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik, diperlukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diselenggarakan oleh para pelaksana layanan sekaligus sebagai bentuk evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Unit Pelayanan Publik yang melaksanakan SKM adalah sebanyak 90 UPP.

Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja pelayanan publik adalah :
Masih perlu ditingkatkannya kualitas Sumber Daya Manusia di seluruh Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja pelayanan publik diantaranya adalah :

- 1) Komitmen Unit Pelayanan Publik untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan publik
- 2) Dukungan Ombudsman RI wilayah Kaltim dalam melaksanakan penilaian kualitas pelayanan yang ditunjukkan melalui hasil survey independent kepatuhan standar pelayanan publik dimana untuk tahun 2017 yang lalu, Kota Balikpapan telah berada pada Zona Hijau dan tidak dilakukan penilaian pada tahun 2018.

Alternatif solusi yang diambil diantaranya adalah :

- 1) Melakukan penataan dengan metode Monitoring dan Evaluasi untuk mendorong dan memotivasi semua Perangkat Daerah dalam menjaga kepatuhan standar pelayanan publik
- 2) Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada petugas pelayanan publik di Perangkat Daerah
- 3) Melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik dan melakukan pendampingan dalam melakukan input data dalam aplikasi SINOVIK
- 4) Melakukan pendampingan untuk update dan penyempurnaan SOP
- 5) Melakukan pembinaan kepegawaian untuk senantiasa memiliki jiwa dan semangat "Melayani"
- 6) Memperkuat aparatur di tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik

- 7) Penataan kelembagaan sehingga perangkat daerah dapat tepat fungsi dalam mendukung peningkatan kualitas dari pelayanan public
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Untuk menunjang Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik didukung Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan kegiatan Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Kegiatan Pembinaan Pelayanan Publik, Program Penataan Kelembagaan, Kegiatan Evaluasi Ketatalaksanaan, Kegiatan Evaluasi Kelembagaan, Kegiatan Analisa Jabatan, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dan Kecamatan dengan Kegiatan Rakor, Orientasi dan Pembinaan Manajemen Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Balikpapan, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur dengan Kegiatan Kajian Kelayakan (Feasibility Study) Rencana Lokasi Kantor Kelurahan Damai, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Kepegawaian dan Disiplin PNS, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.613.352.100,- dan realisasi sebesar Rp. 2.638.338.138,- atau 73.02%.
- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.52.

Analisis Pencapaian Sasaran 10 atas efisiensi penggunaan sumber daya
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6 (4-5)
1	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan	106.46	73.02	33.40

11. Sasaran 11 : Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah
- a. Analisis Pencapaian Sasaran dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

Tabel 3.53.
 Analisis Pencapaian Sasaran 11
 Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan
 Kepala Daerah
 Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase realisasi/capaian anggaran Sekretariat Daerah sesuai perencanaan	%	88	90,49	102,83
2	Indeks Kepuasan pelayanan Sarana dan Prasarana	Angka	77	73,31	95,21
3	Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokolan	Angka	81	77,73	95,96

Pada indikator Persentase realisasi/capaian anggaran Sekretariat Daerah sesuai perencanaan untuk tahun 2018 telah ditetapkan besaran target yang harus dicapai yaitu 88% dan tercapai 90,49% atau 102,83%, yang diukur berdasarkan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah}}{\sum \text{Jumlah Pagu Anggaran sesuai Perencanaan}} \times 100\%$$

(Jumlah realisasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah pagu anggaran sesuai perencanaan)

Pada Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Sarana dan Prasarana diukur berdasarkan hasil survey kepuasan atas pelayanan sarana dan prasana internal di Kantor Wali Kota Balikpapan dengan target pada angka 77 tercapai realisasi pada angka 73,31 atau 95,21%.

Sedangkan untuk Indikator Indeks Kepuasan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan diukur dari hasil survey terhadap kinerja bidang kehumasan dan

keprotokolan dengan target yang harus dicapai pada angka 81 dan mencapai realisasi 77,73% atau 95,96%.

Maka dapat diukur bahwa rata-rata capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah adalah 98%.

- b. Analisis Pencapaian Sasaran Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.54.

Analisis Pencapaian Sasaran 11

Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah Dan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2017
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7 (6-5/5*100%)
1	Persentase realisasi/capaian anggaran Sekretariat Daerah sesuai perencanaan	%	88,33	88,63	90,49	2,09
2	Indeks Kepuasan pelayanan Sarana dan Prasarana	Indeks	0	70,40	73,31	4,13
3	Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokolan	Indeks	0	82,56	77,73	-58,5

- c. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.55.

Analisis Pencapaian Sasaran 11

Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah Dan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Persentase realisasi/capaian anggaran Sekretariat Daerah sesuai perencanaan	%	91	90,49	99,44
2	Indeks Kepuasan pelayanan Sarana dan Prasarana	Indeks	83	73,31	88,33
3	Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokolan	Indeks	84	77,73	92,54

d. Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.56.

Analisis Pencapaian Sasaran 11

Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah Dan Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase realisasi/capaian anggaran Sekretariat Daerah sesuai perencanaan		90,49	-	
2	Indeks Kepuasan pelayanan Sarana dan Prasarana		73,31	-	
3	Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokolan		77,73	-	

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam mencapai Indikator Persentase realisasi/capaian anggaran Sekretariat Daerah sesuai perencanaan yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja adalah dikarenakan Bagian-Bagian di lingkup Setda tidak melaksanakan

proses kegiatannya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan masing-masing.

Alternatif Solusi yang diambil adalah :

- 1) Melakukan Monitoring dan Evaluasi serapan anggaran masing-masing Bagian
- 2) Menghimbau kepada para Kuasa Pengguna Anggaran di Sekretariat Daerah untuk dapat melaksanakan proses kegiatan dan pengamprahan sesuai dengan rencana anggaran kas yang telah ditentukan
- 3) Melaksanakan proses pembayaran berkas tagihan yang masuk ke Bagian Keuangan secara tepat waktu
- 4) Melakukan perubahan Anggaran melalui mekanisme DPPA untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dijalankan pada tahun anggaran berjalan

Sarana dan Prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai target indikator Indeks Kepuasan pelayanan Sarana dan Prasarana, yang menjadi faktor penghambat tercapainya capaian kinerja adalah :

- 1) Keterbatasan anggaran terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja
- 2) Keterbatasan jumlah pegawai
- 3) Minimnya diklat fungsional yang diperoleh masing-masing Pegawai sehingga tidak semua pegawai dapat memahami tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara maksimal

Alternatif solusi yang diambil adalah :

- 1) Menempatkan petugas kebersihan kantor pada setiap Bagian, ruang kerja pimpinan dan fasilitas umum
- 2) Menyediakan bahan dan peralatan kebersihan kantor yang memadai
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian hasil pekerjaan di bidang masing-masing
- 4) Menyediakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan dalam upaya mencapai target kinerja
- 5) Melakukan pengawasan terhadap kualitas/hasil pekerjaan baik secara administrasi maupun operasional
- 6) Membuat SOP tentang :
 - a. Perjalanan Dinas

- b. Penyediaan Konsumsi Kegiatan Rapat/Acara Kedinasan
- c. Peminjaman Ruang Rapat, Aula Kantor dan Aula Rumah Dinas
- d. Peminjaman Tenda dan Kursi Acara Kedinasan
- e. Penyediaan Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Listrik Kantor Wali Kota dan Rumah Dinas
- f. Surat Masuk Internal Bagian Umum dan Perlengkapan
- g. Prosedur surat masuk Pemerintah Kota Balikpapan
- h. Prosedur Surat Keluar

Sedangkan untuk pencapaian target indikator Indeks Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokolan yang menjadi faktor penghambat diantaranya :

- 1) Lambatnya koordinasi Perangkat Daerah dengan Bagian Humas dan Protokol sehingga terkadang persiapan acara harus dilaksanakan secara mendadak
- 2) Kurangnya Aparatur yang menguasai bidang humas dan keprotokolan yang tidak seimbang dengan jumlah acara yang harus difasilitasi

Alternatif solusi yang dilakukan adalah :

- 1) Memberikan pelatihan keprotokolan kepada Aparatur Perangkat Daerah
- 2) Melakukan evaluasi persiapan dan evaluasi dari acara yang telah dilaksanakan
- 3) Melakukan evaluasi atas naskah pidato yang disusun sehingga senantiasa tepat dan sesuai dengan yang diharapkan
- 4) Membuat SOP terkait Protokol Pemerintah Kota.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dapat dijelaskan :

Untuk menunjang Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah didukung Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kota Balikpapan, Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi dan Peralatan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Kegiatan Penyusunan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Kegiatan Penyusunan Laporan dan Evaluasi Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan urusan pemanfaatan aset dan pendapatan daerah, Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota

Balikpapan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 713,916,500,- dan realisasi Rp. 472,825,857,- atau 66,23%.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan pemeliharaan Taman Kantor, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan pemeliharaan Taman Rumah Jabatan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan, Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, Kegiatan Penyediaan Jasa, Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Gedung Kantor, Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Rumah Jabatan, Kegiatan Penyediaan Jasa dan Fasilitas Dukungan Kegiatan Pemerintah Kota, Kegiatan Rehabilitasi dan Revisi Instalasi Jaringan Listrik Bangunan Aset Pemerintah. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, Fasilitasi Dukungan Pelayanan Tamu Pemerintah Kota dengan pagu anggaran Rp. 71,415,400,000,- dan realisasi Rp. 65,475,633,711,- atau 91,68%

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa, Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan, Program Penyeberluasan Informasi Daerah dengan Kegiatan Diseminasi Informasi Daerah, Kegiatan Informasi Publik Pimpinan. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dengan Kegiatan Pelaksanaan Acara, Audiensi, Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Balikpapan, Fasilitasi Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pilkada Tahun 2021. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan Kegiatan Peningkatan Kualitas / Mutu Paduan Suara Pemerintah Kota Balikpapan, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan HUT Kemerdekaan RI, Program Hari Jadi Kota dengan Kegiatan

Pelaksanaan Hari Jadi Kota dengan pagu anggaran Rp. 5,725,373,000,- dan realisasi Rp. 5,372,627,332,- atau 93,84%.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.57.
Analisis Pencapaian Sasaran 11 atas efisiensi penggunaan sumber daya Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Persentase realisasi/capaian anggaran Sekretariat Daerah sesuai perencanaan	102,83	66,23	36,60
2	Indeks Kepuasan pelayanan Sarana dan Prasarana	95,21	91,68	3,53
3	Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokolan	95,96	93,84	2,12

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.58

Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3.0	3.3	110	Rp. 146.895.000,-	Rp. 114.732.625,-	78,11 %.
2	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama	100	95	95	Rp. 956.631.200,-	Rp. 655.699.995,-	68,54 %.
3	Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum	100	100	100	Rp. 1.287.167.000,-	Rp. 997.761.027,-	77,52%
		91	79,77	87,66	Rp. 866.672.400,-	Rp. 278.693.325,-	32,16%.
4	Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota	10 M	6,884,333,47 8,00	68,84	Rp. 842.714.000,-	Rp. 742.273.578,-	88,08%
		5±1%	3,13	137,40	Rp. 495.915.000,-	Rp. 347.177.304,-	70,01%.
5	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat	6	5,06	84,33	Rp. 10.610.816.150,-	Rp. 9.448.708.055,-	89,05%.
6	Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan	80	70,06	87,58	Rp.1.103.500.000,-	Rp. 781.449.563,-	70,82%.
7	Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan	80	75	93,75	Rp. 354.945.000,-	Rp. 238.633.814,-	67,23%.
8	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	3,0			Rp. 877.600.000,-	Rp. 616.101.991,-	70,20 %.
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	70	72,22	103,17	Rp. 156.000.000,-	Rp. 93.483.000,-	59,93%.
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	74	78,78	106,46	Rp. 3.613.352.100,-	Rp. 2.638.338.138,-	73,02%
11	Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolanan Kepala Daerah	88	90,49	102,83	Rp. 713.916.500,-	Rp. 472.825.857,-	66,23%
		77	73,31	95,21	Rp. 71.415.400.000,-	Rp. 65.475.633.711,-	91,68%
		81	77,73	95,96	Rp. 5,725,373,000,-	Rp. 5,372,627,332,-	93,84%
Jumlah					99.166.897.350,-	88.244.929.425,-	88,99%
Total Belanja Langsung					99.166.897.350,-	88.244.929.425,-	88,99%

Tabel 3.59

Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	Program Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan	146.895.000,-	114.732.625,-	78,11	
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Balikpapan	146.895.000,-	114.732.625,-	78,11	
2	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	775.131.200,-	596.137.595,-	76,91	
	Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah	775.131.200,-	596.137.595,-	76,91	
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	181.500.000,-	59.562.400,-	32,82	
	Penataan Administrasi Wilayah	181.500.000,-	59.562.400,-	32,82	
3	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.192.160.000,-	922.302.077,-	77,36	
	Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah	411.480.000,-	216.381.650,-	52,59	
	Sosialisasi produk hukum dan pembinaan keluarga sadar hukum	597.660.000,-	553.133.120,-	92,55	
	Kodifikasi dan penataan dokumentasi hukum	95.550.000,-	86.062.900,-	90,07	
	Pengarsipan Hukum Online	87.470.000			
4	Program Bantuan Hukum dan HAM	866.672.400,-	278.693.325,-	32,16	
	Proses Penyelesaian Perkara dan Pemberian Bantuan Hukum	787,592,400,-	226,686,850-	28,78	
	Rapat koordinasi Panitia RANHAM Kota Balikpapan	79.080.000,-	52.006.475,-	65,76	
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Pembinaan dan Pengembangan Potensi BUMD Kota Balikpapan	473.714.000,-	433.907.078,-	91,60	
6	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana	369.000.000,-	308.366.500,-	83,57	
	Fasilitasi Koordinasi dan Pengawasan Pengembangan Sarana Prasarana Perekonomian Daerah	369.000.000,-	308.366.500,-	83,57	

7	Program Pengendalian Inflasi	295.915.000,-	151.623.304,-	51,24	
	Pengendalian Inflasi Daerah	245.915.000,-	131.965.450,-	83,57	
	Koordinasi Pengawasan dan Evaluasi Pendistribusian Pupuk bersubsidi	50.000.000,-	19.657.854,-	39,32	
8	Program Pengembangan City Gas	200.000.000,-	195.554.000,-	97,78	
	Survei Pengembangan Jaringan Gas Rumah Tangga	200.000.000,-	195.554.000,-	97,78	
9	Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	756.308.000,-	659.684.727,-	87,22	
	Pelaksanaan BBGRM dan Penilaian Kelurahan Terbaik tingkat Kota Balikpapan	330.000.000,-	316.930.309,-	96,04	
	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Mahasiswa KKN	143.150.000,-	121.656.580,-	84,99	
	Pembinaan Posyandu	283.158.000,-	221.097.838,-	78,08	
10	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	94.956.250,-	76.887.825,-	80,97	
	Peningkatan Kesegaran Jasmani	94.956.250,-	76.887.825,-	80,97	
11	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1.807.000.000,-	1.700.566.735,-	94,11	
	Penguatan peran PKK melalui fungsi Kesekretariatan TP PKK Kota	971.000.000,-	926.077.787,-	95,37	
	Penguatan peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja I	97.500.000,-	90.890.135,-	93,22	
	Penguatan peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja II	103.500.000,-	100.585.050,-	92,69	
	Penguatan peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja III	119.000.000,-	110.303.260,-	92,69	
	Penguatan peran PKK dalam hal Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja IV	131.000.000,-	96.330.540,-	73,53	
	Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita Persatuan	385.000.000,-	376.379.963,-	97,76	
12	Program Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	2.653.181.900,-	2.301.956.960,-	86,76	
	Pengelolaan Beasiswa stimulant pendidikan tinggi Kota Balikpapan	2.131.319.000,-	1.874.182.250,-	87,94	

	Pengadaan Natura Pondok Pesantren	521.862.900,-	427.774.710,-	81,97	
13	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.269.150.000,-	2.033.506.790,-	89,62	
	Tabligh Akbar dalam rangka HUT Kota Balikpapan	136.900.000,-	97.474.080,-	71,20	
	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Propinsi dan Nasional	1.012.375.000,-	958.833.300,-	94,71	
	Pelaksanaan Hari Besar Agama Islam	297.775.000,-	222.923.710,-	74,86	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	822.100.000,-	754.275.700,-	91,75	
14	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	3.030.220.000,-	2.676.105.018,-	88,31	
	Koordinasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Perlindungan Masyarakat dengan instansi terkait selama perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru	385.000.000,-	371.244.016,-	96,43	
	Koordinasi, operasi penertiban dan pengawasan ketentraman dan ketertiban Kota Balikpapan	1.015.000.000,-	994.953.800,-	98,03	
	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Balikpapan dalam rangka Pemilu	1.630.220.000,-	1.309.907.202,-	80,35	
15	Program Pengembangan Sistem Pelaporan	1.103.500.000,-	781.449.563,-	70,82	
	Pengendalian kegiatan APBD	427.705.000,-	342.660.647,-	80,12	
	Operasional Tim SIMONTEPRA Kota Balikpapan	336.000.000,-	298.906.318,-	88,96	
	Verifikasi usulan kegiatan pemeliharaan infrastruktur Kota	47.500.000,-	33.988.055,-	71,55	
	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Coastal Area	292.295.000,-	105.894.543,-	36,23	
16	Program Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	215.050.000,-	125.746.000,-	58,47	
	Sarana dan Prasarana Pendukung	103.305.000,-	73.873.000,-	71,51	
	Operasional, Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	155.820.000,-	127.146.900,-	81,60	
	Penyusunan SOP pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan lingkungan	95.820.000,-	37.613.914,-	39,25	

	hidup tata ruang dan tata bangunan				
18	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	516.450.000,-	436.963.425,-	84,61	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan	372.769.000,-	322.359.749,-	86,48	
	Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan	143.681.000,-	114.603.676,-	79,76	
19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	456.158.000,-	254.597.516,-	55,81	
	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	361.151.000,-	179.138.566,-	49,60	
	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	95.007.000,-	75.458.950,-	79,42	
20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	156.000.000,-	93.483.000,-	59,93	
	Pelaksanaan Kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	156.000.000,-	93.483.000,-	59,93	
21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1.032.120.000,-	575.188.956,-	55,73	
	Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat	146.800.000,-	139.267.500,-	94,87	
	Pembinaan Pelayanan Publik	885.320.000,-	435.921.456,-	49,24	
22	Program Penataan Kelembagaan	611.725.000,-	314.248.932,-	51,37	
	Evaluasi Ketatalaksanaan	47.275.000,-	13.937.500,-	29,48	
	Evaluasi Kelembagaan	49.725.000,-	24.025.000,-	48,32	
	Analisa Jabatan	514.725.000,-	276.286.432,-	53,68	
23	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	220.000.000,-	173.531.990,-	78,88	
	Rakor Orientasi dan Pembinaan Manajemen Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Balikpapan	220.000.000,-	173.531.990,-	78,88	
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	50.000.000,-	38.437.500,-	76,88	
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Kepegawaian dan Disiplin PNS	50.000.000,-	38.437.500,-	76,88	
26	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.699.507.100,-	1.563.715.760,-	92,01	
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	1.699.507.100,-	1.563.715.760,-	92,01	
27	Program Peningkatan dan Pengembangan	713.916.500,-	472.825.857,-	66,23	

	Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Evaluasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kota Balikpapan	471.875.000,-	294.284.811,-	62,36	
	Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan	73.975.000,-	72.417.620,-	97,89	
	Pemeliharaan rutin/berkala Aplikasi dan Peralatan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	45.000.000,-	42.000.000,-	93,33	
	Penyusunan Anggaran Sekretariat Daerah	30.750.000,-	25.434.338,-	82,71	
	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah	31.859.000,-	21.407.238,-	67,19	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Pendapatan Daerah	41.870.000,-	3.735.600,-	8,92	
	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	18.587.500,-	13.546.250,-	72,88	
28	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	27.833.700.000	26.736.774.686,-	96,01	
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	2.500.000.000,-	2.094.992.140,-	83,80	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	133.700.000,-	121,933,800,-	91,20	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	200.000.000,-	196,459,060,-	98,23	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000.000,-	990,741,100,-	99,07	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.000.000.000,-	9.914.989.350,-	99,15	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	10.500.000.000,-	10.055.800.686,-	95,77	
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	2.000.000.000,-	1.995.906.000,-	99,80	
	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Kantor	1.500.000.000,-	1.365.952.550,-	91,06	
29	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	26.382.200.000,-	23.529.654.482,-	89,19	
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan	750.000.000,-	362.863.050,-	43,38	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1.196.850.000,-	885.610.656,-	74,40	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3.016.300.000,-	2.514.375.121,-	83,36	

	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Gedung Kantor	5.969.050.000,-	5.944.952.694,-	99,60	
	Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Rumah Jabatan	2.750.000.000,-	2.498.606.620,-	90,86	
	Penyediaan Jasa dan Fasilitas Dukungan Kegiatan Pemerintah Kota	5.000.000.000,-	4.991.068.500,-	99,82	
	Rehabilitasi dan Revisi Instalasi Jaringan Listrik Bangunan Aset Pemerintah	1.200.000.000,-	1.020.274.550,-	85,02	
	Penyediaan Bahan Bakar kendaraan dinas/operasional dan peralatan lainnya	6.500.000.000,-	5.311.903.291,-	81,72	
30	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	699.500.000,-	650.930.750,-	93,06	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	699.500.000,-	650.930.750,-	93,06	
31	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	16.500.000.000,-	14.558.273.793,-	88,23	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	4.500.000.000,-	3.767.502.000,-	83,72	
	Fasilitasi Dukungan Pelayanan Tamu Pemerintah Kota	12.000.000.000,-	10.790.771.380,-	89,92	
32	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	406.180.000,-	344.860.850,-	84,90	
	Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa	40.900.000,-	36.450.000,-	89,12	
	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan	365.280.000,-	308.410.850,-	84,43	
33	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	409.908.000,-	318.565.860,-	77,72	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	409.908.000,-	318.565.860,-	77,72	
34	Program Penyeberluasan Informasi Daerah	514.100.000,-	456.045.299,-	88,71	
	Informasi Publik Pimpinan	514.100.000,-	456.045.299,-	88,71	
35	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	545.000.000,-	532.051.900,-	97,62	
	Pelaksanaan Acara, Audiensi, Penerimaan Tamu Pemerintah Kota	545.000.000,-	532.051.900,-	97,62	

BAB IV
PENUTUP

	Balikpapan				
36	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	55.000.000,-	54.642.320,-	99,35	
	Peningkatan Kualitas / Mutu Paduan Suara Pemerintah Kota Balikpapan	55.000.000,-	54.642.320,-	99,35	
37	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	995.185.000,-	931.050.328,-	93,56	
	Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan HUT Kemerdekaan RI	995.185.000,-	931.050.328,-	93,56	
38	Program Hari Jadi Kota	2.800.000.000,-	2.735.410.775,-	97,69	
	Pelaksanaan Hari Jadi Kota	2.800.000.000,-	2.735.410.775,-	97,69	

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2018 terdapat 11 (Sebelas) sasaran strategis dan 15 (lima belas) indikator kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 11 (sebelas) sasaran strategis dan 15 (lima belas) indikator kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Pencapaian sasaran 1

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian 105,33% atau kategori Sangat Tinggi

b. Pencapaian Sasaran 2

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 95 % dengan kategori Sangat Tinggi

c. Pencapaian Sasaran 3

Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 89,89%, dengan kategori Tinggi

- d. Pencapaian Sasaran 4
Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 103,12%, dengan kategori Sangat Tinggi
- e. Pencapaian Sasaran 5
Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 84,33% dengan kategori Tinggi
- f. Pencapaian Sasaran 6
Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan realisasi mencapai 87,58% dengan kategori Tinggi
- g. Pencapaian Sasaran 7 terdiri dari 1 Indikator dengan realisasi mencapai 93,75%, dengan kategori Sangat Tinggi
- h. Pencapaian Sasaran 8 terdiri dari 1 Indikator dengan realisasi mencapai 112.67% dengan kategori sangat tinggi
- i. Pencapaian Sasaran 9 terdiri dari 1 Indikator dengan realisasi mencapai 103,17% dengan kategori sangat tinggi
- j. Pencapaian Sasaran 10 terdiri dari 1 Indikator dengan realisasi mencapai 106,46% dengan kategori sangat tinggi
- k. Pencapaian Sasaran 11 terdiri dari 3 Indikator dengan realisasi mencapai 98% dengan kategori Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 11 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menunjukkan trend yang baik untuk mencapai target akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yaitu dengan capaian kinerja 98,12% atau dapat dikategorikan Sangat Tinggi. Walau demikian masih terdapat indikator sasaran yang capaiannya belum seperti diharapkan sehingga harus mendapat perhatian dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017-2021, dapat dipenuhi

sesuai dengan harapan. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi.

2. SARAN

Untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan seperti yang disebutkan di atas maka strategi pemecahan masalahnya dalam upayanya untuk lebih meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah ke depan adalah:

a. Peningkatan koordinasi antar Bagian

- 1) Semakin intensifnya rapat koordinasi antar Bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan visi dan pemahaman dengan dikoordinasikan oleh Asisten.
- 2) Adanya konsistensi yang bulat dan utuh dari kesatuan visi dan pemahaman yang telah disepakati bersama dengan implementasinya di lapangan.

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia

- 1) Pendidikan dan pelatihan dengan metode atau sistem pembelajaran yang reformatif yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan beban kerja yang lebih kompleks.
- 2) Pembinaan mental spiritual aparatur Pemerintah Daerah.

- c. Terhadap upaya peningkatan indikator kinerja, agar dilakukan monitoring dan evaluasi berkala secara berjenjang terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan disertai pengumpulan data dan informasi yang efektif. Untuk Indikator Kinerja yang belum berorientasi hasil/outcomes maka perlu diadakan reviu bersamaan dengan reviu berkala pada perencanaan kinerja berikutnya.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



SAYID MN FADLI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan dalam rangka mewujudkan Tema Kerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SAYID MN FADLI, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. RIZAL EFFENDI, S.E**
Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2018 yang merupakan tahapan pencapaian target kinerja yang tertuang didalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja khusus yang merupakan pendukung pencapaian Tema Kerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2018 yaitu Tahun Integritas.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja sesuai dokumen perencanaan dan target kinerja khusus menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pencapaian target kinerja dan target kinerja khusus yang diperjanjikan sesuai lampiran ini merupakan indikator penilaian dan bahan evaluasi kinerja pihak pertama oleh pihak kedua.

Pihak kedua dapat melakukan evaluasi dalam rangka penempatan dalam jabatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh pihak kedua.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

H. M. RIZAL EFFENDI, S.E

Balikpapan, 15 Januari 2018

Pihak Pertama

Drs. SAYID MN FADLI, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Angka	3,0 (Sangat Tinggi)
2	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100%
3	Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum	Persentase Rancangan Produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Persen	100%
		Hasil capaian penilaian implementasi HAM	Angka	91
4	Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota	Nilai Kontribusi BUMD Terhadap PAD/Investasi	Angka	Rp. 10.000.000.000,00
		Persentase Inflasi Kota Balikpapan	Persen	5±1%
5	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	Persen	6%
6	Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan	Persentase capaian program/kegiatan strategis	Persen	80%
7	Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan	Persentase perizinan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	Persen	80%
8	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Kepuasan pengadaan barang dan jasa Pemerintah	Angka	3.0
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKJIP pada sub komponen pelaporan kinerja pada bobot nilai lebih dari sama dengan 10 (nilai baik)	Persen	70%
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan	Angka	74
11	Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah	Persentase realisasi/capaian anggaran Sekretariat Daerah sesuai perencanaan	Persen	88%
		Indeks Kepuasan pelayanan Sarana dan Prasarana	Angka	77
		Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokolan	Angka	81

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	26,958,461,500	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	26,082,200,000	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	699,500,000	APBD
4.	Pengembangan Sistem Pelaporan	1,103,500,000	APBD
5.	Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Kota	354,945,000	APBD
6.	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1,807,000,000	APBD
7.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Membangun Kelurahan	756,308,000	APBD
8.	Pengendalian Keluarga Berencana	158,816,350	APBD

9.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	406,180,000	APBD
10.	Penyebarluasan Informasi Daerah	514,100,000	APBD
11.	Pembinaan dan Permasalahan Olahraga	152,406,250	APBD
12.	Pengelolaan Keberagaman Budaya	2,316,950,000	APBD
13.	Penyiapan Potensi Sumber Daya dan Sarana Prasarana	369,000,000	APBD
14.	Pengembangan City Gas	200,000,000	APBD
15.	Perencanaan Pembangunan Daerah	156,000,000	APBD
16.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,187,630,500	APBD
17.	Pengendalian Inflasi	295,915,000	APBD
18.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	456,157,000	APBD
19.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	105,000,000	APBD
20.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	220,000,000	APBD
21.	Penataan Kelembagaan	611,725,000	APBD
22.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	15,045,000,000	APBD
23.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,192,160,000	APBD
24.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	2,653,181,900	APBD
25.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	995,185,000	APBD
26.	Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan	146,895,000	APBD
27.	Bantuan Hukum dan HAM	866,672,400	APBD
28.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1,032,120,000	APBD
29.	Layanan Pengadaan Barang & Jasa	516,450,000	APBD
30.	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	775,131,200	APBD
31.	Penataan Daerah Otonomi Baru	181,500,000	APBD
32.	Hari Jadi Kota	2,800,000,000	APBD
33.	Pemeliharaan Kantramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2,380,220,000	APBD
	JUMLAH	93,496,310,100	

Balikpapan, Januari 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN



H. M. RIZAL EFFENDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



SAYID MN. FADLI

MONEV CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

TRIWULAN : IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN								Capaian Kinerja 2017		Rasio Capaian Kinerja	Keterangan
					TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		T	R		
					T	R	T	R	T	R	T	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=5+7+9+11	14=6+8+10+12	15=14/13*100%	16	
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Nilai LPPD	Angka	3,0	-	-	3,0	3,16	-	-	-	-	3,0	3,16	105,33	Bagian Pemerintahan (Hasil penilaian untuk LPPD tahun 2016 yang diumumkan di tahun 2018)
2	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan kerjasama	2 Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	-	-	-	-	-	-	100,00	95,00	100,00	95,00	95,00	Bagian Perkotaan
3	Tertatanya Produk Hukum Daerah dan meningkatnya budaya taat hukum	3 Persentase Rancangan Produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Persentase	100%	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Hukum
		4 Hasil capaian penilaian implementasi HAM	Angka	91	-	-	-	-	-	-	91,00	79,77	91,00	79,77	87,66	Bagian Hukum
4	Meningkatnya partisipasi swasta dan BUMD terhadap pembangunan Kota	5 Nilai Kontribusi BUMD Terhadap PAD/Investasi	Rupiah	10.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000.000,00	6.884.333.478,00	10.000.000.000	6.884.333.478,00	68,84	Bagian Perekonomian
		6 Persentase Inflasi Kota Balikpapan	Persentase	5±1%	-	-	-	-	-	-	5,00	3,13	5,00	3,13	137,40	Bagian Perekonomian
5	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat	7 Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	Persentase	6%	-	-	-	-	-	-	6,00	5,06	6,00	5,06	84,33	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan
6	Meningkatnya kualitas administrasi pelaksanaan pembangunan	8 Persentase capaian program/kegiatan strategis	Persentase	80%	5,00	4,79	20,00	17,20	25,00	18,75	30,00	29,32	80,00	70,06	87,58	Bagian Administrasi Pembangunan
7	Terwujudnya pengendalian pembangunan dan tata ruang berwawasan lingkungan	9 Persentase perizinan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	Persentase	80%	20,00	15,00	20,00	15,00	20,00	20,00	20,00	25,00	80,00	75,00	93,75	Bagian Perkotaan
8	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	10 Indeks Kepuasan pengadaan barang dan jasa Pemerintah	Angka	3,00	-	-	-	-	3,00	3,38	-	-	3,00	3,38	112,67	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	11	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai LKJIP pada sub komponen pelaporan kinerja lebih dari sama dengan 10% (nilai baik)	Persentase	70%	-	-	-	70%	72,22%	-	-	-	70%	72,22%	103,17	Bagian Organisasi (Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap LKJIP PD Tahun 2017 yang dievaluasi di tahun 2018)	
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	12	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat di Unit Pelayanan Publik Kota Balikpapan	Angka	74	-	-	-	74,00	78,78	-	-	-	74,00	78,78	106,46	Bagian Organisasi	
11	Meningkatnya Pelayanan Administrasi, Sarana, Prasarana Internal, Keprotokolan Kepala Daerah	13	Persentase realisasi/capaian anggaran Sekretariat Daerah sesuai perencanaan	Persentase	88%	22,00	16,72	22,00	24,91	22,00	21,86	22,00	27,00	88,00	90,49	102,83	Bagian Keuangan	
		14	Indeks Kepuasan pelayanan Sarana dan Prasarana	Angka	77	77,00	73,31	-	-	-	-	-	-	-	77,00	73,31	95,21	Bagian Umum dan Perlengkapan
		15	Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokolan	Angka	81	-	-	81,00	77,73	-	-	-	-	-	81,00	77,73	95,96	Bagian Humas dan Protokol

Mengesahkan,
WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 2 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

H.M. RIZAL EFFENDI

SAYID MN. FADLY

PERJANJIAN KINERJA KHUSUS
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN : 2018

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET SEMESTER I	TARGET SEMESTER II	KETERANGAN
1	Tertib Penggunaan dan Administrasi Daftar Hadir Elektronik	a. Penggunaan Daftar Hadir elektronik	99% hari kerja	99% hari kerja	
		b. Tertib Administrasi Pengendalian Daftar Hadir	Pegawai terlambat, pulang cepat, izin, cuti seluruhnya teradministrasi dengan baik / Tersedia buku kendali	Pegawai terlambat, pulang cepat, izin, cuti seluruhnya teradministrasi dengan baik / Tersedia buku kendali	
2	Pencegahan Korupsi	Persentase Penandatanganan Pakta Integritas	100% (seluruh PNS yang menduduki Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah melakukan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas)	100% (seluruh PNS yang menduduki Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator tidak melakukan Pelanggaran Pakta Integritas)	
3	Penguatan Akuntabilitas	Persentase penandatanganan Perjanjian Kinerja Individu yang terkait dengan Kinerja Perangkat Daerah	100% (seluruh PNS yang menduduki Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah melakukan penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Individu)	100% (seluruh PNS yang menduduki Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah dilakukan Pengukuran Kinerja Individu secara periodik)	


Balikpapan, Januari 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN



H. M. RIZAL EFFENDI, SE

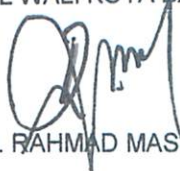
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



Drs. SAYID MN FADLI, M.Si

Menyaksikan,

WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN



H. RAHMAD MAS'UD, SE

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA KHUSUS
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2018

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET SEMESTER I	REALISASI SEMESTER I	TARGET SEMESTER II	REALISASI SEMESTER II		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Tertib Penggunaan dan Administrasi Daftar Hadir Elektronik	a. Penggunaan Daftar Hadir elektronik minimal 99%	99% hari kerja	Kantor Wali Kota :	100% hari kerja menggunakan daftar hadir elektronik	99% hari kerja	Kantor Wali Kota :	100% hari kerja menggunakan daftar hadir elektronik
				Rumah Jabatan Wali Kota :	100% hari kerja menggunakan daftar hadir elektronik		Rumah Jabatan Wali Kota :	100% hari kerja menggunakan daftar hadir elektronik
				Rumah Jabatan Wakil Wali Kota :	100% hari kerja menggunakan daftar hadir elektronik		Rumah Jabatan Wakil Wali Kota :	100% hari kerja menggunakan daftar hadir elektronik
				Sekretariat PKK :	100% hari kerja menggunakan daftar hadir elektronik		Sekretariat PKK :	100% hari kerja menggunakan daftar hadir elektronik
		b. Tertib Administrasi Pengendalian Daftar Hadir	Pegawai terlambat, pulang cepat, izin, cuti seluruhnya teradministrasi dengan baik / Tersedia buku kendali	Telah tersedia Buku Kendali di tiap Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	Pegawai terlambat, pulang cepat, izin, cuti seluruhnya teradministrasi dengan baik / Tersedia buku kendali	Telah tersedia Buku Kendali di tiap Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kota Balikpapan		
2	Pencegahan Korupsi	Persentase Penandatanganan Pakta Integritas	100% yang menduduki jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah melakukan Penandatanganan Pakta Integritas	100% yang menduduki jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah melakukan Penandatanganan Pakta Integritas	100% yang menduduki jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator tidak melakukan pelanggaran Pakta Integritas	100% yang menduduki jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah melakukan Penandatanganan Pakta Integritas		

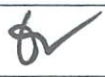









NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET SEMESTER I	REALISASI SEMESTER I	TARGET SEMESTER II	REALISASI SEMESTER II
1	2	3	4	5	6	7
3	Penguatan Akuntabilitas	Persentase Penandatanganan Perjanjian Kinerja Individu yang terkait dengan Kinerja Perangkat Daerah	100% yang menduduki jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah melakukan Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Individu	100% yang menduduki jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah melakukan Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Individu	100% yang menduduki jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah dilakukan pengukuran Kinerja Individu secara periodik	100% yang menduduki jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator telah melakukan Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Individu

Balikpapan, 20 Januari 2019
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



SAYID MN. FADLI

LEMBAR PARAF KOORDINASI

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. M. SAUFAN	Asisten Administrasi Umum	
2.	H. SAID IQBAL YAHYA	Kabag Pemerintahan	
3.	ZULKIFLI	Kabag Perkotaan	
4.	DAUD PIRADE	Kabag Hukum	
5.	H. SUTADI	Kabag Humas dan Protokol	
6.	ARZAEDI RACHMAN	Kabag Perekonomian	
7.	FREDDY OCTAVIANUS NELWAN	Kabag Administrasi Pembangunan	
8.	ARIF DWIYANTO	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	
9.	SY. MUHDAR	Kabag Kesejahteraan Rakyat	
10.	Hj. HERDA WIDAYATI	Kabag Keuangan	
11.	H. SUPARMAN	Kabag Umum dan Perlengkapan	
12.	ANI MUFAIDAH	Kabag Organisasi	